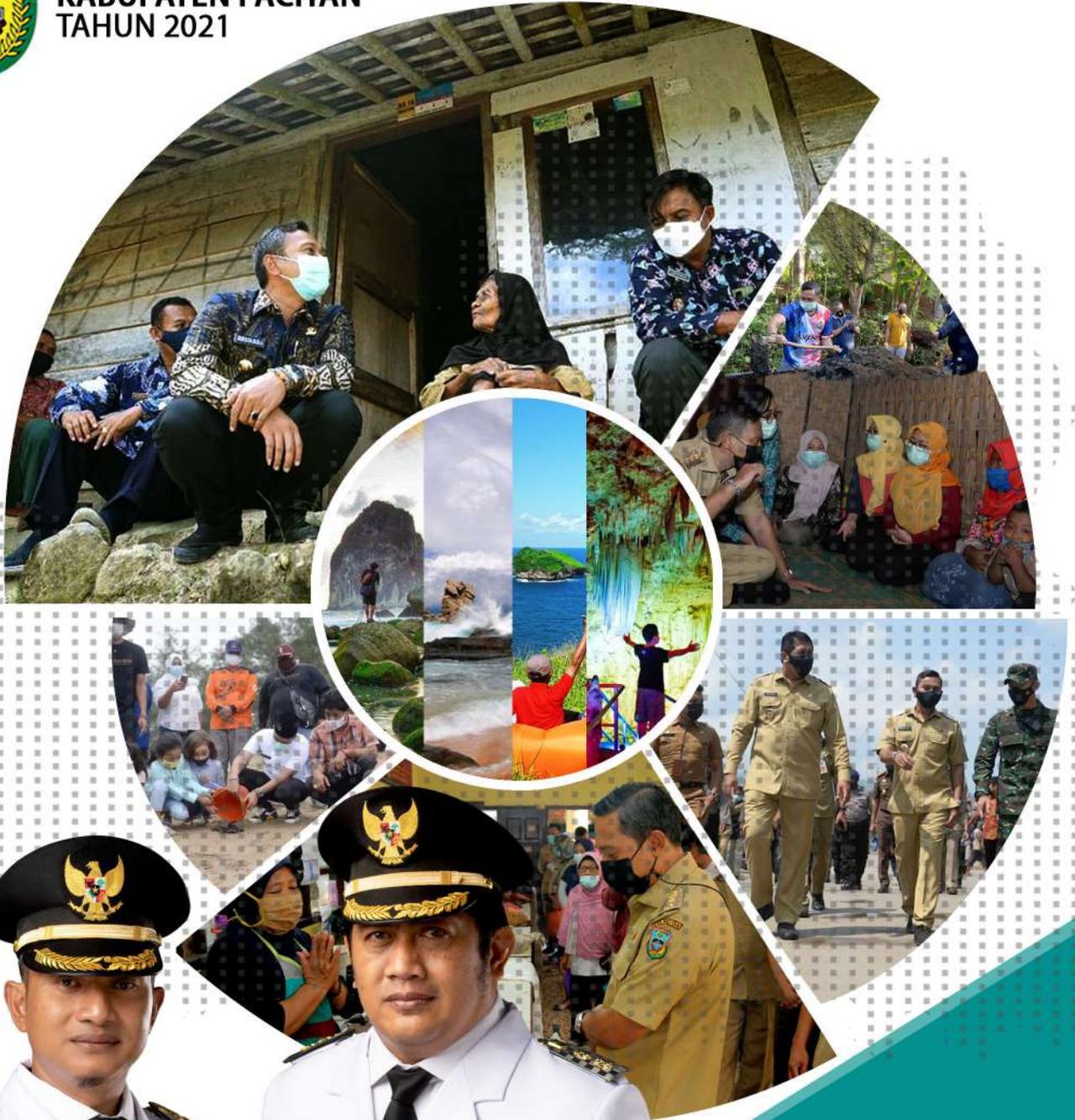




PEMERINTAH  
KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2021



# LPPD

LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga telah tersusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021, yang berisi laporan gambaran umum daerah dan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, serta kinerja sepanjang tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan ini secara teknis mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,. Laporan disusun sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dibuat semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Pacitan, Maret 2022



INDRAJAYA NUK BAYUAJI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.1.1 Penjelasan Umum**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan amanah Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta membuat Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ Bupati Pacitan setiap tahun yang disampaikan ke DPRD telah mendapat respon positif, hal ini dibuktikan dengan adanya pembahasan serta catatan strategis dari DPRD yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif yang pada hakekatnya mempunyai kedudukan setara dan bersifat kemitraan. Kesetaraan kedudukan tersebut bermakna bahwa di antara kedua lembaga Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) mempunyai

kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi satu sama lainnya (*checks and balance*).

Penyusunan LPPD Kepala Daerah yang disampaikan kepada DPRD dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi penyelenggaraan (***Progress Report***) Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang mencakup arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi yang diklasifikasi menjadi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menggambarkan perkembangan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan bersama DPRD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021.

#### **A. Undang – Undang Pembentukan Daerah**

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965.

## B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Posisi koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara 7,55° - 8,17° Lintang Selatan dan 110,55° - 111,25° Bujur Timur.

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,87 km<sup>2</sup>, dimana secara administratif terbagi atas 12 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 166 desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,62 km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu seluas 71,86 km<sup>2</sup>.

Kondisi topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km<sup>2</sup> atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- b) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km<sup>2</sup> atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- c) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km<sup>2</sup> atau 24 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- d) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km<sup>2</sup> atau 52 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- e) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km<sup>2</sup> atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 24,26mm<sup>3</sup>, sedangkan curah hujan terkecil pada bulan September sebesar 2,19mm<sup>3</sup>.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 Ha
- Pemukiman Penduduk : 4,43% atau 6.157,33Ha
- Hutan : 57,13% atau 79.397,00 Ha
- Sawah : 9,00% atau 12.509,26 Ha
- Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 Ha

### C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan  
Jenis Kelamin Tahun 2021

USIA	L	%	P	%	JUMLAH	%
0-4Thn	10.936	1,83	10.236	1,71	21.174	3,54
5-9Thn	16.903	2,83	15.947	2,67	32.853	5,50
10-14Thn	20.602	3,45	19.415	3,25	40.020	6,70
15-19Thn	19.733	3,30	18.469	3,09	38.205	6,39
20-24Thn	21.816	3,65	20.586	3,44	42.406	7,10
25-29Thn	22.103	3,70	20.580	3,44	42.687	7,14
30-34Thn	20.751	3,47	19.928	3,33	40.682	6,81
35-39Thn	22.280	3,73	21.320	3,57	43.604	7,30
40-44Thn	20.979	3,51	20.267	3,39	41.250	6,90
45-49Thn	19.751	3,31	19.986	3,34	39.740	6,65
50-54Thn	23.739	3,97	23.973	4,01	47.716	7,98
55-59Thn	20.665	3,46	21.633	3,62	42.301	7,08
60-64Thn	19.089	3,19	20.017	3,35	39.109	6,54
65>Thn	40.442	6,77	45.434	7,60	85.883	14,37
<b>JUMLAH</b>	<b>299.789</b>	<b>50,17</b>	<b>297.791</b>	<b>49,83</b>	<b>597.630</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan*

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan jumlah penduduk akhir tahun 2021 mencapai 597.630 jiwa terdiri atas 299.789 jiwa penduduk laki – laki dan 297.791 jiwa penduduk perempuan.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15 tahun – 64 tahun) jumlahnya sebesar 417.700 jiwa atau mencapai 69,90 % total penduduk yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat).

Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**

Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pertanian/ Perkebunan / Peternakan	189.989	41,40
2	Perikanan / Kelautan	1.371	0,30
3	Pertambangan/ Industri	154	0,03
4	Perdagangan	3.482	0,76
5	Angkutan/ Transportasi	877	0,19
6	Bank/ Persewaan/ Perusahaan	346	0,08
7	Jasa – jasa	38.024	8,29
8	Pemerintahan	10.953	2,39
9	Kesehatan	380	0,08

No	Lapangan Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
10	Pendidikan	2.400	0,52
11	Keagamaan	27	0,01
12	Lain – lain	75	0,02
	- Pensiunan	4.187	0,91
	- Belum/tdk bekerja	85.098	18,55
	- Mengurus rumah tangga	34.425	7,50
	- Pelajar mahasiswa	87.071	18,98
	<b>JUMLAH</b>	<b>458.859</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian/ perkebunan/ Peternakan adalah yang terbesar daripada lapangan usaha lain yang ada di Kabupaten Pacitan mencapai 41,40 %. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan mendorong pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa angkutan, dimana hal ini juga membentuk sektor usaha perbankan yang mendukung pembiayaan sektor usaha juga ikut berkembang.

Sumberdaya Manusia yang berkualitas adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang sanggup menampung produktivitas sektor pendidikan sehingga terjadi dinamika yang seimbang antara pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan laju sektor ekonomi. Bidang pendidikan khususnya guru mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas.

Tingkat produktifitas dan kompetensi anak didik seseorang sangat ditentukan oleh kualitas pendidik yang cerdas dan terampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan  
Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Tidak mempunyai ijazah	92.614	15,50
2	Tamat SD	219.310	36,70
3	Tamat SLTP	120.986	20,25
4	Tamat SLTA/ sederajat	93.620	15,67
5	Tamat D2	2.500	0,42
6	Tamat D3/ Akademi	2.783	0,47
7	Tamat Diploma IV/ S1/ S2/ S3	21.054	3,52
<b>Jumlah</b>		<b>597.580</b>	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

#### D. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Berdasarkan dengan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jumlah kecamatan dan desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Kecamatan Donorojo	Sawahan
		Kalak
		Sendang
		Klepu
		Gedompol
		Cemeng

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
		Gendaran
		Sukodono
		Sekar
		Donorojo
		Belah
		Widoro
2	Kecamatan Punung	Bomo
		Sooko
		Punung
		Mendolo Kidul
		Piton
		Kendal
		Wareng
		Mantren
		Ploso
		Mendolo Lor
		Kebonsari
		Gondosari
		Tinatar
3	Kecamatan Pringkuku	Dersono
		Sugihwaras
		Watukarung
		Jlubang
		Candi
		Poko
		Dadapan
		Pringkuku
		Sobo
		Ngadirejan
		Glinggangan

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
		Pelem
		Tamanasri
4	Kecamatan Pacitan	Pacitan
		Pucangsewu
		Sidoharjo
		Ploso
		Baleharjo
		Kembang
		Sukoharjo
		Kayen
		Sirnoboyo
		Arjowinangun
		Bangunsari
		Sedeng
		Sumberharjo
		Tanjungsari
		Menadi
		Mentoro
		Purworejo
		Nanggung
		Widoro
		Semanten
		Sambong
		Banjarsari
		Bolosingo
		Ponggok
		Tambakrejo
5	Kecamatan Arjosari	Sedayu
		Tremas
		Arjosari

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
		Gunungsari
		Pagutan
		Gembong
		Borang
		Gegeran
		Kedungbendo
		Mangunharjo
		Temon
		Karanggede
		Karangrejo
		Jetis Kidul
		Gayuhan
		Jatimalang
		Mlati
6	Kecamatan Kebonagung	Plumbungan
		Karangnongko
		Kalipelus
		Karanganyar
		Katipugal
		Klesem
		Sidomulyo
		Worawari
		Mantren
		Gawang
		Kebonagung
		Purwoasri
		Banjarjo
		Sanggrahan
		Punjung
		Gembuk

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
		Ketro
		Ketepung
		Wonogondo
7	Kecamatan Nawangan	Gondang
		Mujing
		Nawangan
		Sempu
		Jetis Lor
		Tokawi
		Penggung
		Pakis Baru
		Ngromo
8	Kecamatan Bandar	Petrungsinarang
		Ngunut
		Bandar
		Kledung
		Tumpuk
		Watupatok
		Bangunsari
		Jeruk
9	Kecamatan Tegalombo	Kebondalem
		Gedangan
		Ngreco
		Kasihani
		Pucangombo
		Gemaharjo
		Ploso
		Tegalombo
		Kemuning
		Tahunan

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
		Tahunan Baru
10	Kecamatan Tulakan	Jetak
		Nglaran
		Wonoanti
		Padi
		Kluwih
		Bungur
		Tulakan
		Jatigunung
		Gasang
		Kalikuning
		Ngile
		Bubakan
		Losari
		Ngumbul
		Wonosidi
		Ketro
11	Kecamatan Ngadirojo	Sidomulyo
		Hadiwarno
		Hadiluwih
		Tanjungpuro
		Pagerejo
		Wiyoro
		Ngadirojo
		Cokrokembang
		Bodag
		Tanjung lor
		Nogosari
		Cangkring
		Bogoharjo

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
		Wonodadi Wetan
		Wonodadi Kulon
		Wonokarto
		Wonosobo
		Wonoasri
12	Kecamatan Sudimoro	Pager Kidul
		Pager Lor
		Sukorejo
		Sudimoro
		Ketanggung
		Klepu
		Sumber Rejo
		Gunung Rejo
		Karang Mulyo
		Sembowo

#### E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Sesuai dengan data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan per tanggal 31 Desember 2021 Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai sebagai berikut :

**Tabel 1.5**

Daftar Perangkat Daerah dan Pegawai  
per 31 Desember 2021

No	Instansi	JML
		PNS
1	Sekretariat Daerah	110
2	Sekretariat DPRD	30
3	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	38

No	Instansi	JML
		PNS
	Daerah	
4	Inspektorat	40
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17
6	Badan Pendapatan Daerah	24
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	32
8	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	29
9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	15
10	BPBD	12
11	Dinas Pendidikan	138
	UPT TKSD + Guru DPK	374
	Guru SMP + Staf TU	1.065
	Guru SD + Penjaga	2.429
12	Dinas Kesehatan	53
	UPT Puskesmas	698
13	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	47
14	Dinas Perikanan	28
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	29
16	Dinas Lingkungan Hidup	60
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	24
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang	66
19	Dinas Pangan	18
20	Dinas Pertanian	106
21	Dinas Perhubungan	44
22	Dinas Perpustakaan	24
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20
24	Dinas Sosial	26
25	RSUD	321
26	Satpol PP	41
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	58

No	Instansi	JML
		PNS
28	Dinas PPKB dan PPPA	20
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24
30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan	24
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	31
32	Sekretariat KPU	1
33	Kecamatan	223
34	Kelurahan	24
<b>JUMLAH</b>		<b>6.363</b>

Sesuai dengan data dinding pegawai Kabupaten Pacitan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 jumlah keseluruhan pegawai sejumlah 6.363 orang, tersebar disemua Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung dan pelaksanaan urusan pemerintah yang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 182 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2021.

Maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2021.

Sedangkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 secara lengkap sebagai berikut :

**Tabel. 1.6**  
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.610.798.165.584,00</b>	<b>1.695.124.683.282,75</b>	<b>105,24</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	141.408.260.531,00	211.689.109.365,52	149,7
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.397.755.191.030,00	1.410.964.746.873,14	100,95
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	71.634.714.023,00	72.470.827.044,09	101,17
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.707.353.800.414,00</b>	<b>1.610.281.291.593,25</b>	<b>94,31</b>
1	BELANJA OPERASI	1.202.844.925.830,00	1.129.605.443.865,05	93,91
2	BELANJA MODAL	196.194.162.383,00	174.928.799.770,00	89,16
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.874.193.270,00	12.174.540.228,00	94,57
4	BELANJA TRANSFER	295.440.518.931,00	293.572.507.730,20	99,37
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.707.353.800.414,00</b>	<b>1.610.281.291.593,25</b>	<b>94,31</b>
	<b><u>SURPLUS/(DEFISIT)</u></b>	<b>-96.555.634.830,00</b>	<b>84.843.391.689,50</b>	<b>-87,87</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>96.555.634.830,00</b>	<b>96.558.034.829,67</b>	<b>100</b>
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.555.634.830,00	96.558.034.829,67	100
	<b><u>PEMBIAYAAN NETTO</u></b>	<b>96.555.634.830,00</b>	<b>96.558.034.829,67</b>	<b>100</b>

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0	181.401.426.519,17	

Keterangan: - Data sebelum audit BPK

- % : Realisasi terhadap Pendapatan dan belanja Daerah

## 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Kabupaten Pacitan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi kepala daerah telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Pacitan.

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Dalam upaya percepatan pembangunan di segala bidang masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan, antara lain:

#### 1. Masih rendahnya kualitas pendidikan

Masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Pacitan yang ditandai dengan masih sedikitnya jumlah sekolah SSN, yaitu pada tingkat SD 24 lembaga atau 5,7%, tingkat SMP 24 lembaga atau 34,78%, tingkat SMU 6 lembaga atau 50% dan pada tingkat SMK 1 lembaga atau 8,33%.

Selain dari masih sedikitnya jumlah sekolah yang berstandar nasional, Kabupaten Pacitan juga menduduki peringkat yang rendah untuk hasil ujian nasional tahun ajaran 2009/2010 dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur.

Peringkat hasil ujian nasional untuk tingkat SD/MI Kabupaten Pacitan menduduki peringkat 32 dari 38 kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur, untuk tingkat SMP menduduki peringkat 37, untuk tingkat SMU (IPA) menduduki peringkat 36, untuk tingkat SMU (IPS) menduduki peringkat 37, sedangkan untuk tingkat SMK menduduki peringkat 34.

## **2. Rendahnya akses pendidikan**

Angka partisipasi kasar pada semua tingkat pendidikan menunjukkan capaian yang cukup baik, terutama pada tingkat SD/MI yang berjumlah 103,10%. Dari semua tingkat pendidikan, yang memiliki capaian rendah yaitu pada tingkat PAUD yang baru mencapai 41,18%. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs sudah mencapai jumlah 97% dan SMU/SMK/MA berjumlah 67,15%.

## **3. Kurangnya sarana prasarana pelayanan medis**

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat. Di Kabupaten Pacitan sarana prasarana pelayanan medis masih kurang yaitu ditandai dengan hanya tersedianya satu unit Rumah Sakit (RS) untuk melayani seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan. Selain itu masih banyaknya pasien golongan menengah ke atas yang lebih percaya pada rumah sakit di kabupaten/kota tetangga untuk berobat, merupakan tantangan tersendiri bagi Kabupaten Pacitan untuk menyediakan kualitas pelayanan yang maksimal sehingga seluruh lapisan golongan masyarakat dapat terlayani kesehatannya di Kabupaten Pacitan.

## **4. Banyaknya kondisi jalan yang rusak**

Prasarana Transportasi adalah salah satu prasarana yang sangat penting dan vital untuk mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Kondisi Kabupaten Pacitan yang berbukit dan bergunung menyebabkan pembangunan sarana perhubungan

seperti jalan dan jembatan banyak mengalami kendala. Sehingga hal ini mengakibatkan pertumbuhan daerah–daerah pinggiran dan pelosok pedesaan Kabupaten Pacitan lambat berkembang. Kondisi prasarana infrastruktur Kabupaten Pacitan saat ini masih belum memadai ditandai dengan banyaknya jalan yang berlubang dan rusak yang mengindikasikan betapa belum maksimalnya pelayanan infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitan, dengan kondisi jalan aspal yang rusak pada tahun 2010 sebesar 23,33 % dan kondisi rusak berat berjumlah 16,17 %.

**5. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan sanitasi dan kesehatan lingkungan**

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kabupaten Pacitan terhadap kesehatan dasar masih rendah, hal ini ditandai dengan masih adanya rumah yang belum memiliki jamban sendiri berjumlah 22,93% dan rumah yang belum memiliki sanitasi berjumlah 23,44%. Selain itu secara umum cakupan layanan kebersihan di Kabupaten Pacitan mengalami kondisi yang kurang maksimal hal ini disebabkan perkembangan volume sampah di Kabupaten Pacitan yang sangat pesat sehingga perkembangan infrastruktur persampahan tidak dapat memenuhi.

**6. Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Belum optimalnya peningkatan PAD ditandai dengan pendanaan pembangunan Kabupaten Pacitan masih mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, diharapkan ke depan lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD.

**b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

➤ **Visi Dan Misi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan

Nomor 2 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 1995 Kabupaten Pacitan mempunyai semboyan "**TATA PRAMANA HARGENG PRAJA**" yang mengandung makna tekad pemerintah dan masyarakat Pacitan untuk menciptakan pemerintahan yang arif, bijaksana serta mampu mengayomi dan mewujudkan masyarakat yang Adil, Makmur Tata Tentrem Kerto Raharjo dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan semboyan Kabupaten Pacitan tersebut di atas Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Visi pembangunan daerah adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan lima tahun. Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah serta mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemelihan umum kepala daerah, maka visi Kabupaten Pacitan periode 2016 – 2021 adalah

- **VISI**

Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2016 - 2021 adalah “ **MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT** ”

Apabila dijabarkan Visi tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

“ **MAJU** ” adalah memiliki makna bahwapembangunan daerah dan masyarakat Pacitan mengarah ke depan menuju ke kondisi lebih baik, yang merupakan perwujudan sinergi semua pelaku pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi dan memperhatikan permasalahan yang ada.

“ **SEJAHTERA** ” adalah mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

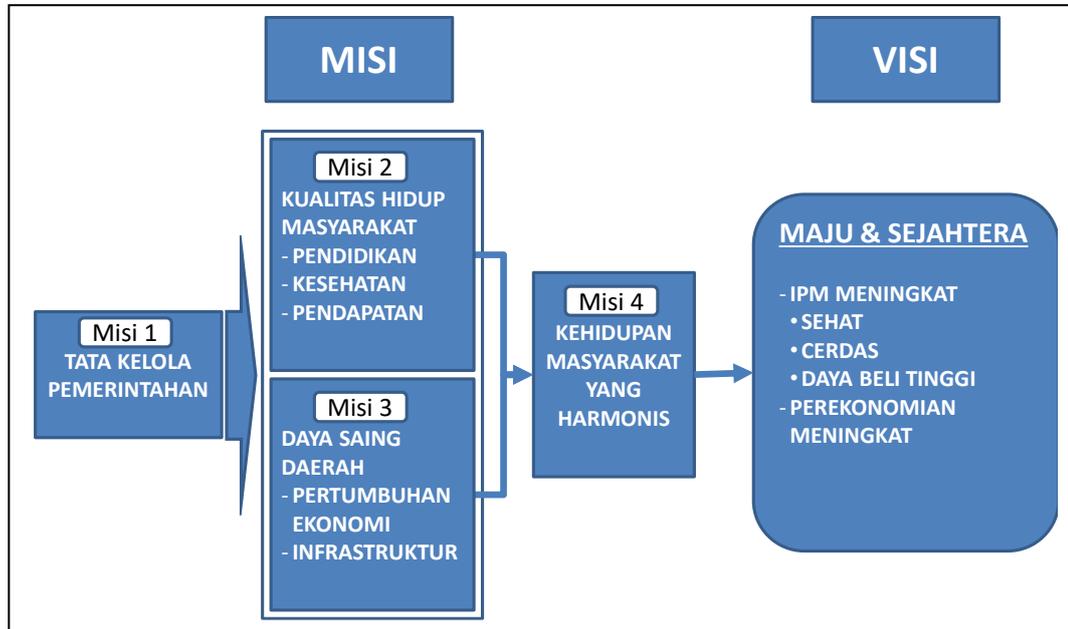
- **MISI**

Misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat;
3. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
4. Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian visi melalui 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016 - 2021 disajikan pada Gambar 2.1.

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021**



Sebagaimana gambar 2.1, untuk mewujudkan visi “Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat” langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan terlebih dahulu sebagaimana misi pertama. Tata kelola pemerintahan yang harus diperkuat terutama

Sebagaimana gambar 2.1, untuk mewujudkan visi “Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat” langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan terlebih dahulu sebagaimana misi pertama. Tata kelola pemerintahan yang harus diperkuat terutama kemampuan Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan harus memiliki SDM yang profesional, agar mampu memberikan pelayanan publik dengan lebih baik,

mengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel serta mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Selanjutnya dengan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat mendukung misi kedua untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat, melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Disamping itu dengan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan didukung kualitas hidup masyarakat yang baik diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Untuk meningkatkan daya saing daerah, maka pertumbuhan ekonomi harus lebih dipacu selama 5 (lima) tahun kedepan, melalui program-program pembangunan bidang ekonomi dengan menggerakkan potensi daerah terutama pariwisata, pertanian (agropolitan) dan kelautan (minapolitan) yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Ketiga misi tersebut akan dapat berjalan dan diwujudkan apabila kondisi masyarakatnya kondusif dan harmonis, sebagaimana harapan misi keempat yaitu meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat. Apabila keempat misi tersebut dapat diwujudkan, maka visi pembangunan Kabupaten Pacitan “Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat” 5 (lima) tahun kedepan akan tercapai dengan indikator masyarakat Pacitan makin sehat, makin cerdas dan daya belinya tinggi atau dengan kata lain indikator Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan meningkat serta perekonomian Kabupaten Pacitan juga meningkat.

**c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pacitan **“MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”**.

Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2016 - 2021 terdapat beberapa kebijakan dan program unggulan. Kebijakan dan program unggulan tersebut merupakan program yang berdaya ungkit dan diharapkan mampu memberi dampak yang besar dan luas bagi pembangunan Kabupaten Pacitan. Program unggulan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh program-program pembangunan yang lain.

Kebijakan dan program unggulan yang dimaksud, yaitu:

**MISI 1: MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN AKUNTABEL**

1. Birokrasi Profesional dan Berkarakter, melalui Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melalui Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
3. Predator (Petugas Registrasi Armada Sepeda Motor) dan Silades (Sidang Langsung di Desa), melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan.
4. Pelayanan Publik Prima Berbasis IT (Pacitan e-gov), melalui Program Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika.
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
6. Pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, melalui Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
7. Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana, melalui Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

**MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT**

1. Padu PAUD (Pacitan Peduli PAUD), melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pacitan Cendekia, melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

3. Guru CAKEP (Cakap, Kompetitif, Edukatif Dan Profesional), melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Pembinaan Olah Raga dan Kepemudaan, melalui :
  - a. Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olah raga
  - b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pacitan (JPKP), melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
6. Kampung ASI, melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
7. GARSIA (Gerakan Selamatkan Ibu dan Anak), melalui Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
8. SANTUN MAPAN (Sanitasi Total Untuk Masyarakat Pacitan), melalui Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
9. Ketahanan Keluarga Berbasis Posdaya, melalui Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Secara Mandiri.
10. GRINDULU MAPAN (Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan), melalui program-program pembangunan yang mendukung penanggulangan kemiskinan.
11. Peningkatan Rehabilitasi Sosial, melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

**MISI 3: MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN MENGERAKKAN POTENSI DAERAH DIDUKUNG KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI**

1. Rumah Pangan Lestari, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

2. Pacitan Bebas Rawan Pangan, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
3. Pertanian Untuk Kini dan Nanti, melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian.
4. Bangga Beternak, melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
5. Sejahtera Bersama Usaha Mikro dan Koperasi, melalui Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
6. Revitalisasi Pasar Daerah/Tradisional, melalui Program Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa.
7. Industri berdaya saing, melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
8. Ayo Wisata Ke Pacitan, melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
9. Transportasi MAPAN (Mantap, Aman dan Nyaman), melalui Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
10. Pengelolaan Sumber Daya Air Berdaya Guna, melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya.
11. Pacitan Bebas Kawasan Kumuh, melalui Program Pengembangan Perumahan.
12. Air Bersih untuk rakyat, melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Air Minum.
13. Pacitan BERSERI (Bersih, Sehat dan Lestari), melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

**MISI 4: MENINGKATKAN KESALEHAN SOSIAL DAN HARMONISASI ANTAR SELURUH LAPISAN MASYARAKAT**

1. Pacitan Rukun Damai (pemantapan kualitas beragama dan kerukunan hidup beragama), melalui Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.
2. Pacitan Adem Ayem (peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat), melalui Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal.
3. Pacitan Berubah (revolusi mental dan penguatan jati diri masyarakat berbasis kearifan lokal), penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia, pelestarian seni budaya tradisional dan jati diri masyarakat Pacitan, melalui Program Pengembangan Nilai Budaya.

**d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan dokumen perencanaan Tahunan**

Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dengan dokumen perencanaan tahunan adalah sebagai berikut :

**Tabel. 1.7**

Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>OPD</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

NO	URUSAN	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN
			1. Pengelolaan SD (DAK) 2. Pengelolaan SMP (DAK) 3. Pengelolaan PAUD (DAK)
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			1. Pembangunan Puskesmas 2. Pengembangan Puskesmas

### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka pemerintah Kabupaten Pacitan wajib melaksanakan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk 6 urusan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar. Gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 dilihat dengan perencanaan pembangunan yang memprioritaskan penanganan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tersebut dibawah ini :

#### **A. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Dasar Pertimbangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

#### **B. Dasar Hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pacitan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
2. Permedagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
4. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah.

5. Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan.
7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45 / 1089 / KPTS / 408.12/2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan.

### C. Kebijakan Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan tahun 2016 – 2021, kebijakan dan program diarahkan untuk pencapaian Visi Kabupaten Pacitan. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk beberapa jenis layanan dasar, sedangkan program yang tidak terkait langsung merupakan urusan pilihan dan potensial dikembangkan di Kabupaten Pacitan.

Adapun program – program dan kegiatan yang diarahkan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk pencapaian target SPM tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.8**

Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang	1. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
	guru PAUD Dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD</li> <li>4. Pengelolaan Dana BOP PAUD</li> </ul>	
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang guru Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan Ruang Kelas Baru</li> <li>2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</li> <li>3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</li> <li>4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas</li> <li>5. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</li> <li>6. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</li> <li>7. Penambahan Ruang Kelas Baru</li> <li>8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas</li> <li>9. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</li> </ul>	
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan</li> <li>2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan)</li> <li>3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</li> </ul>	

**Tabel 1.9**

Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

**Tabel 1.10**

Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM  
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

<b>N O</b>	<b>PROGRAM DALAM RPJMD</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANA PROGRAM</b>
<b>1</b>	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<b>Dinas PU PR</b>
<b>2</b>	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan sarana dan prasarana air limbah	

**Tabel 1.11**

Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM  
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021

<b>NO</b>	<b>PROGRAM DALAM RPJMD</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANA PROGRAM</b>
<b>1</b>	Program Lingkungan Sehat Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</li> <li>2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</li> <li>3. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan</li> <li>4. Fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)</li> <li>5. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (DAK )</li> </ol>	<b>Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan</b>

**Tabel 1.12**

Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM  
Bidang Ketrentaman dan Ketertiban Tahun 2021

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan</li> <li>2. Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> <li>3. Penertiban Perizinan</li> <li>4. Pengawasan dan Pengendalian Ketertarikan dan Ketertiban</li> </ol>	SATPOL PP
2	Program pemeliharaan ketertarikan, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Penanganan Pelanggaran Perda</li> <li>2. Pembinaan dan Penyuluhan Pelanggaran PERDA</li> <li>3. Pemberdayaan PPNS</li> </ol>	
3	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan PBK</li> <li>2. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (PMK)</li> <li>3. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)</li> </ol>	
4	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam</li> <li>2. Penanganan Masalah Bencana Alam</li> <li>3. Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana</li> <li>4. Fasilitasi Posko Penanggulangan Bencana</li> <li>5. Bantuan rekonstruksi pasca bencana</li> </ol>	BPBD

**Tabel 1.13**

Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM  
Bidang Sosial Tahun 2021

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia</li> <li>2. Fasilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas</li> <li>3. Fasilitasi dan Rehabilitasi Sosial Anak</li> <li>4. Penanggulangan Bencana Alam Berbasis Masyarakat</li> <li>5. Penanggulangan dan Penanganan Bencana Sosial</li> </ol>	

Program dan kegiatan lain, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan bersifat mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada masing-masing bidang.



## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro adalah gambaran secara umum keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program baik pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten pihak swasta dan pihak terkait dalam pembangunan nasional.

Dalam satu tahun penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja makro pemerintah daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 2.1**

Indikator kinerja makro Kabupaten Pacitan tahun 2020 - 2021

NO	URAIAN	TAHUN	
		2020*	2021**
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,39	68.57
2	Angka Kemiskinan (%)	14,54	15.11
3	Angka Pengangguran ( % )	2,28	2.04
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,84	2.49
5	Pendapatan per kapita (rupiah)	28.477.000	-
6	Ketimpangan Pendapatan ( Gini Ratio )	0,34	0.337

*Ket : \* angka perbaikan*

*\*\* angka sementara*

Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Angka Sementara Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 Mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Angka Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diproyeksikan mencapai 2,49 % sedangkan tahun 2020

hanya mencapai – 1,84 %.

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 sebesar 68,57 mengalami kenaikan sebesar 0,17 poin atau 0,28% dibanding dengan capaian tahun 2020 sebesar 68,39. Angka Kemiskinan dengan kondisi tahun 2020 sejumlah 14,54 % dari total jumlah penduduk dan meningkat pada tahun 2021 mencapai 15,11 % atau mengalami peningkatan sebesar 0,57 %. Kenaikan tersebut diakibatkan karena adanya pandemi covid 19 yang membuat perekonomian nasional merosot tajam.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pacitan tahun 2020 mencapai 2,28 % dan turun 0,24% pada tahun 2021 mencapai 2,04 %.

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Pacitan tahun Rp. 28.477.000 pada tahun 2020 Sedangkan pada tahun 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Sedangkan ketimpangan pendapatan ( gini ratio ) pada tahun 2020 sebesar 0,34 % sama seperti tahun 2021 sebesar 0,337 % atau 3,4 %.

## **2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat merupakan tujuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui adanya tugas pembantuan dan pemberian otonomi secara luas. Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional dan kemudian pemerintah nasional membentuk Daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi secara luas serta adanya tugas pembantuan, memberikan konsekuensi bagi daerah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman. Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang

pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016. Selanjutnya pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPD) kepada masyarakat.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/ kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing - masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Adapun dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah tersebut, secara teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut, format laporan Kepala Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan didasarkan pada urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang diklasifikasikan menjadi Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebanyak 6, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebanyak 18, Urusan Pilihan sebanyak 6 dan Urusan Penunjang Pemerintahan sebanyak 5.

### **2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

Dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis, dan akurat, disajikan cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2021 berdasarkan dengan Indikator Kinerja Kunci Keluaran setiap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Capaian kinerja kunci keluaran setiap urusan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah secara lengkap sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**

Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) Memuat Capaian Kinerja Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1	<b>PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) sebanyak .....	459.00	459.00	Dinas Pendidikan
			2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak.....	150.00	150.00	Dinas Pendidikan
			3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak.....	174.00	174.00	Dinas Pendidikan
			4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD ( Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD ( Negeri dan Swasta) sebanyak ....	2249.00	2249.00	Dinas Pendidikan
			5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) sebanyak ...	2166.00	2166.00	Dinas Pendidikan
			6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sebanyak ...	547.00	547.00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah sebanyak ...	259.00	259.00	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi sebanyak ...	487.00	487.00	Dinas Pendidikan
			9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak ...	92.00	92.00	Dinas Pendidikan
			10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak ...	146.00	146.00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak ....	33323.00 0	33323.000	Dinas Pendidikan
			12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak ....	14065.00 0	14065.000	Dinas Pendidikan
			13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak .....	3437.000	3437.000	Dinas Pendidikan
			14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak ....	1112.00	1112.00	Dinas Pendidikan
			15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar sebanyak .....	4044.00	4044.00	Dinas Pendidikan
			16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak .....	1343.00	1343.00	Dinas Pendidikan
			17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak .....	836.00	836.00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1			18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak .....	216.00	216.00	Dinas Pendidikan
			19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak .....	528.00	528.00	Dinas Pendidikan
			20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak .....	396.00	396.00	Dinas Pendidikan
			21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak .....	1778.00	1778.00	Dinas Pendidikan
			22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak .....	824.00	824.00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1			23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak ....	418.00	418.00	Dinas Pendidikan
			24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak .....	71.00	71.00	Dinas Pendidikan
			25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak .....	517.00	517.00	Dinas Pendidikan
			26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak .....	385.00	385.00	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam	27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi sebanyak ...	487.00	487.00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		pendidikan menengah pertama							
			28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak ....	92.00	92.00	Dinas Pendidikan	
			29	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak ....	146.00	146.00	Dinas Pendidikan	
			30	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak ....	33323.00	33323.00	Dinas Pendidikan	
			31	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak .....	14065.00	14065.00	Dinas Pendidikan	
			32	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar sebanyak .....	3437.00	3437.00	Dinas Pendidikan	
		33	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama sebanyak .....	1112.00	1112.00	Dinas Pendidikan		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			34	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar sebanyak .....	4044.00	4044.00	Dinas Pendidikan
					-	-	0	
			35	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama sebanyak .....	1343.00	1343.00	Dinas Pendidikan
							0	
			36	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar sebanyak .....	836.00	836.00	Dinas Pendidikan
			37	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama sebanyak .....	216.00	216.00	Dinas Pendidikan
			38	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar sebanyak .....	528.00	528.00	Dinas Pendidikan
			39	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama sebanyak .....	396.00	396.00	Dinas Pendidikan
			40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak .....	1778.00	1778.00	Dinas Pendidikan
							0	
			41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak .....	824.00	824.00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			42	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak .....	418.00	418.00	Dinas Pendidikan
			43	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak .....	71.00	71.00	Dinas Pendidikan
			44	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak .....	517.00	517.00	Dinas Pendidikan
			45	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak .....	385.00	385.00	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	46	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) sebanyak .....	17.00	17.00	Dinas Pendidikan
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1			47	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak .....	500.00	500.00	Dinas Pendidikan
			48	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak .....	2208.00	2208.00	Dinas Pendidikan
			49	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) sebanyak .....	392.00	392.00	Dinas Pendidikan
			50	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) sebanyak .....	142.00	142.00	Dinas Pendidikan
			51	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sebanyak .....	109.00	109.00	Dinas Pendidikan
			52	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak .....	19.00	19.00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			53	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 sebanyak .....	19.00	19.00	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	54	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar sebanyak .....	3.00	100.00	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	55	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya sebanyak .....	3.00	2.00	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	56	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	6835.00	6153.00	0	Dinas Kesehatan
					Dukungan Logistik seperti :				
					1 . Vaksin Tetanus Difetri (Td)				
					2 . Tablet Tambah Darah				
3 . Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin									
4 . Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu									
5 . Buku KIA , dll									
	57	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal sebanyak .....	341.00	6153.00	0	Dinas Kesehatan		
	58	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	7000.00	5994.00	0	Dinas Kesehatan		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan							

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dukungan Logistik seperti :			
					1 . Formulir Fotograf			
					2 . Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)			
					3 . Buku KIA , dll			
			59	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar sebanyak .....	341.00	5994.00	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	60	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	7591.00	5676.00	Dinas Kesehatan
					Dukungan Logistik seperti :			
					1 . Vaksin Hepatitis BO			
					2 . Vitamin K1 Injeksi			
					3 . Salep/Tetes Mata Antibiotik			
					4 . Formulir Bayi Baru Lahir , 5. Formulir MTBM			
					6 . Buku KIA , dll			
			61	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar sebanyak .....	341.00	5994.00	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	62	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	26000.00	24405.00	Dinas Kesehatan
					Dukungan Logistik seperti :			
					1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku			
					2 . Formulir DDTK			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
		3	4	5	6	7	8		9
1					3 . Vitamin A Biru , Vitamin A Merah				
					4 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell , 5. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella				
					6 . Jarum Suntik dan BHP, Peralatan Anafilaktik, Buku KIA , dll				
				63	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebanyak .....	341.00	24405.00	Dinas Kesehatan
				64	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	60000.00	59188.00	Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Dukungan Logistik seperti :			
						1 . Buku Raport Kesehatanku			
	2 . Buku Pemantauan Kesehatan								
	3 . Kuesioner Skrining Kesehatan								
	4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah								
			6 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah , dll						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1			65	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar sebanyak .....	342.00	59188.00	Dinas Kesehatan
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	66	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	250000.00	216085.00
		Dukungan Logistik seperti :						
		1 . Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes						
		2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) , DII						
			67	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak .....	414.00	216085.00	Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	68	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	85000.00	84279.00	Dinas Kesehatan
					Dukungan Logistik seperti :			
					1 . Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol			
					3 . Buku Kesehatan Lansia , DII			
-								

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			69	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak .....	120.00	84279.00	Dinas Kesehatan
					-	-		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	300.00	85654.00	Dinas Kesehatan
					Dukungan Logistik seperti :			
					1 . Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE			
					2 . Tensimeter			
					3 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM , DII			
			71	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak .....	168.00	85654.00	Dinas Kesehatan
					-	-		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	90000.00	7320.00	Dinas Kesehatan
					Dukungan Logistik seperti :			
					1 . * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet			
					2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM			
					3 . Pedoman dan Media KIE , DII			
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
		3	4	5	6	7	8		
1			73	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak .....	168.00	7320.00	Dinas Kesehatan	
			-						
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	74	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	300.00	1126.00	Dinas Kesehatan
						Dukungan Logistik seperti :			
						1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia			
						2 . Kit Berisi 2 Alat Fiksasi			
						3 . Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan			
						4 . Media KIE , DII			
			75	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak .....	144.00	1126.00	Dinas Kesehatan	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	76	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	5000.00	2284.00	Dinas Kesehatan		
				Dukungan Logistik seperti :					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data				
		3	4	5	6	7	8		9			
1					1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)							
					2 . Reagen Zn TB							
					3 . Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95							
					4 . Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng							
					5 . Catridge Tes Cepat Molekuler							
					6 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan							
					7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur , DII							
					-	-						
					77	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak .....	144.00	2284.00	Dinas Kesehatan
					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	78			1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	16600.00	15740.00
Dukungan Logistik seperti :												
1 . Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner												
2 . Tes Cepat HIV (RDT) Pertama												

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3 . Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai * Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK			
					4 . Lainnya...			
					-	-		
			79	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	144.00	15740.00	Dinas Kesehatan
					-	-		
3	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	80	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha) .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			81	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			82	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
		3	4	5	6	7	8		9
1			83	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	anjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m) .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
						-			
			84	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
						-			
			85	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
						-			
			86	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah :	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
						i. Bangunan perkuatan tebing (m)			
						ii. Tanggul sungai (m)			
						iii. Kanal banjir (m)			
						iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)			
						v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					vi. Polder/Kolam Retensi (Unit)			
					vii. Breakwater (m)			
					viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)			
					-	-		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	87	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha) .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						-	-	
			88	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						-	-	
			89	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) .....	0.00	0.00	
						-	-	
			90	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m) .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			91	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			92	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah :	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					i. Bangunan perkuatan tebing (m)			
					ii. Tanggul sungai (m)			
					iii. Kanal banjir (m)			
					iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)			
					v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)			
					vi. Polder/Kolam Retensi (Unit)			
					vii. Breakwater (m)			
					viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)			
					-	-		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	278.069	51.29%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Panjang jaringan irigasi primer (m)	542.138		
			94	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)	33.119	26.79%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	123.622		
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	95	1. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Adanya dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1		melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	96	2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						-		
			97	3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1.00	1.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						-		
		98	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					-			
			99	5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain sebanyak .....	NIHIL	NIHIL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						-		
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS sebanyak .....	139354.000	139354.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			101	2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T sebanyak .....	NIHIL	NIHIL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			102	3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T sebanyak .....	139.000	139.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-	0	
			103	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			104	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			105	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-		
			106	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\sum$ Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik $\times 100\% \sum$ Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha	139.354 146.528	95.1%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			107	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\sum$ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT $\times 100\% \sum$ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha	0.00	NaN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			108	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\sum$ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD $\sum$ rumah di wilayah pengembangan SPALD T	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			109	10. Kinerja penyediaan unit pelayanan setempat	$\sum$ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	139.354 146.528	95.1%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					∑ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S			
					-			
			110	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	∑ Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					∑ Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota			
					-			
			111	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	∑ Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	0.00	NaN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					∑ Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota			
					-			
			112	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	∑ Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					∑ Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota			
					-			
			113	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	∑ Jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					∑ Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S	0.00		
					-			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	114	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\sum$ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku  $\sum$ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)  -	 0.00 0.00  -	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			115	2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting sebanyak .....	100.00	100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			116	3. Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			117	4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			118	5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			119	6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			120	7. Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kab/Kota	Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kab/Kota sebanyak .....	53.00	53.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			121	8. Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat sebanyak .....	10.00	10.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	122	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kab/Kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kab/Kota ..... M	798.00	798.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			123	2. Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun .....m	2.00	2.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			124	3. Panjang jembatan yang dibangun	Panjang jembatan yang dibangun .....m	3.00	3.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			125	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) .....m	2000.00	2000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			126	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan .....m	3.00	3.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			127	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi .....m	543129.00	543129.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			128	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Panjang jembatan yang direhabilitasi .....m	5.00	5.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			129	8. Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipelihara .....m	543126.000	543126.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			130	9. Panjang jembatan yang dipelihara	Panjang jembatan yang dipelihara .....m	810.00	810.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	131	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						-	-	
			132	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota sebanyak .....	62.00	62.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						-	-	
			133	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota sebanyak .....	62.00	62.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			134	4. Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					-	-		
			135	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
		3	4	5	6	7	8		9
					-	-			
			136	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					-	-			
			137	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					-	-			
			138	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					-	-			
			139	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			140	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			141	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			142	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah kab/kota	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah kab/kota	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			143	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			144	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			145	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			146	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			147	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			148	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kab/Kota	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota sebanyak .....	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			149	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			150	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			151	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1			152	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			153	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			154	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			155		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	156	-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	157	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya sebanyak .....	120488.000	120488.000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			158	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Jumlah rumah yang terkena bencana alam sebanyak .....	6.00	6.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			159	3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam sebanyak .....	6.00	6.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			160	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			161	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			162	6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi sebanyak .....	4.00	4.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			163	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana sebanyak .....	12.00	12.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
					-	-		
			164	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi sebanyak .....	6.00	6.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
					-	-		
			165	9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan sebanyak .....	0.00001	0.00001	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
					-	-		
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	166	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0.00001	0.00001	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
					-	-		
			167	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM sebanyak .....	0.00001	0.00001	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			168	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM sebanyak .....	0.00001	0.00001	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			169	4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM sebanyak .....	0.00001	0.00001	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			170	5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM sebanyak .....	0.00001	0.0000 1	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			171	6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah .....Ha	0.00001	0.0000 1	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani	172	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha .....Ha	276.20	276.20	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			173	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH sebanyak .....	1090.00	1090.0 0	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			174	3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh .....Ha	3.00	3.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	175	Jumlah rumah di kab/kota	Jumlah rumah di kab/kota sebanyak .....	160651.0 00	160651 .000	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
				-				
			176	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH sebanyak .....	1090.00	1090.0 0	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pertanahan
			177	Jumlah rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak .....	19152.00	19152.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			178	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Jumlah rumah yang tidak dihuni sebanyak .....	112.00	112.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			179	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	209940.00	13.1%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			180	Jumlah rumah pembangunan baru	Jumlah rumah pembangunan baru sebanyak .....	58.00	58.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	181	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	5.00	5.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			182	3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan sebanyak .....	744.00	744.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			183	4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) sebanyak .....	744.00	744.00	Dinas Perumahan Rakyat,

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
		3	4	5	6	7	8		9
					-	-		Permukiman dan Pertanahan	
			184	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH sebanyak .....	5.00	5.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	
					-	-			
			185	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU sebanyak .....	744.00	744.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	
					-	-			
			186	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Jumlah pengembang yang tersertifikasi sebanyak .....	5.00	5.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	
					-	-			
			187	8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Jumlah pengembang yang teregistrasi sebanyak .....	5.00	5.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	
					-	-			
			188	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan sebanyak .....	5.00	5.00	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	
					-	-			
5	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	189	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani sebanyak .....	84.00	84.00	Satuan Polisi Pamong Praja	
			190	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan sebanyak .....	3168.00	3168.00	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			191	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak .....	41.00	41.00	Satuan Polisi Pamong Praja	
			192	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS sebanyak .....	3.00	3.00	Satuan Polisi Pamong Praja	
			193	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	14.00	14.00	Satuan Polisi Pamong Praja	
			194	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Tersedianya sarana prasarana minimal (Dibuat dalam bentuk daftar)	167.00	167.00	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	195	-	-			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	196	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	1.00	100.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan				1.00			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	197	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	586110.00	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana				586110.00			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	198	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	1.00	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan				1.00			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	199	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	1.00	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan				1.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			200	3. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	90.00	0.1151 469%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
					- X 100% jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana	78161.00				
			201	4. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	jumlah warga negara yang ikut pelatihan	90.00	0.1151 469%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
					- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	78161.00				
			202	5. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops	586110.0 0	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
						100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			586110.0 0	
						-			-	
			203	6. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan	115.00	0.0196 2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
						jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			586110.0 0	
						-			-	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	204	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	1.00	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
									Jumlah seluruh penetapan status KLB	1.00
									-	-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			205	2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana	8.00	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						8.00		
					Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana			
					-	-		
			206	3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	19.00	29%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						66.00		
					jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana			
					-	-		
			207	4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	33.00	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						33.00		
					Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana			
					-	-		
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	208	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	79.00	79.00	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-		
			209	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Ada	Satuan Polisi Pamong Praja
					-	-		
			210	3. Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Ada	Satuan Polisi Pamong Praja
					-	-		
			211	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa (Dibuat dalam bentuk daftar)	2.00	2.00	Satuan Polisi Pamong Praja
					-	-		
			212	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi sebanyak .....(Dibuat dalam bentuk daftar)	101.00	101.00	Satuan Polisi Pamong Praja
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1			213	6. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran sebanyak .....	24.00	24.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						-		
			214	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran sebanyak .....	0 orang	0 orang	Satuan Polisi Pamong Praja
						-		
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	215	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran sebanyak .....(kegiatan/pelatihan)	0 kegiatan/pelatihan	0.00	Satuan Polisi Pamong Praja
						-		
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	216	-	-	
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	217	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki sebanyak .....	2.00	2.00	Dinas Sosial
						-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	218	2. Jumlah data penyangang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Jumlah data penyangang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM sebanyak .....	912.00	912.00	Dinas Sosial
						-		
			219	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Sosial
						-		
			220	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau sebanyak .....	912.00	912.00	Dinas Sosial
						-		
		221	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki sebanyak .....	3.00	3.00	Dinas Sosial	
					-			
		222	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakaman sesuai standar gizi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakaman sesuai standar gizi sebanyak .....	458.00	458.00	Dinas Sosial	
					-			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1			223	7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar sebanyak .....	19.00	19.00	Dinas Sosial
						-		
			224	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Sosial
			225	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu sebanyak .....	25.00	25.00	Dinas Sosial
						-		
			226	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Sosial
			227	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Sosial
					-			
228	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Sosial			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
			229	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah sebanyak .....	2.00	2.00	Dinas Sosial
			-	-	-	-	-	-
			230	14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan sebanyak .....	208.00	208.00	Dinas Sosial
			-	-	-	-	-	
			231	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial sebanyak .....	912.00	921.00	Dinas Sosial
			-	-	-	-	-	
232	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat sebanyak .....	216.00	216.00	Dinas Sosial			
-	-	-	-	-				
233	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Sosial			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-		
			234	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak .....	38.00	38.00	Dinas Sosial
					-	-		
			235	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga sebanyak .....	8.00	8.00	Dinas Sosial
					-	-		
			236	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga sebanyak .....	8.00	8.00	Dinas Sosial
					-	-		
			237	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk sebanyak .....	37.00	37.00	Dinas Sosial
					-	-		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	238	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan sebanyak .....	334.00	334.00	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			-	-		
			239	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Sosial
					-	-		
			240	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki sebanyak .....	2.00	2.00	Dinas Sosial
					-	-		
			241	4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan sebanyak .....	334.00	334.00	Dinas Sosial
				-	-			
		242	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial sebanyak .....	334.00	334.00	Dinas Sosial	
				-	-			
		243	6. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia sebanyak .....	208.00	208.00	Dinas Sosial	
				-	-			
7	<b>TENAGA KERJA</b>	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	244	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota (Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku)	1.00	1.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			245	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%	-	3.00	75%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					realisasi indikator - Target indikator	4.00			
					Realisasi				
			246	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota sebanyak .....	-	1.00	1.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	247	1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n	-	19.00 23.00	82.6%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n				
			248	2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n	-	4.00	80.0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n		5.00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-		
			249	3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n	4.00	1.0869 6%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						368.00		
					Jumlah peserta pelatihan pada tahun n			
			250	4. Persentase LPK yang terakreditasi	LPK yang terakreditasi pada tahun n	0.00	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						5.00		
					- X 100% Jumlah seluruh LPK pada tahun n			
					-	-		
			251	5. Persentase LPK yang memiliki	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n	5.00	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						5.00		
					Jumlah LPK yang terdata pada tahun n			
			252	6. Jumlah penganggur yang dilatih	Jumlah Peserta Pelatihan pada tahun n...	1609.00	20%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						7860.00		
					- X 100% Jumlah penganggur pada tahun n ...			
			253	7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	1609.00	100.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	1609.00		
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			254	8. Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n		0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					jumlah lulusan pada tahun n	1609.00		
			255	9. Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n	368.00	22.87%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	1609.00		
						-		
			256	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI dilatih	20.00	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah CPMI terdaftar	20.00		
			257	11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Jumlah Pelatihan CPMI yang dilaksanakan ...	0.00	NaN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah Pelatihan CPMI yang direncanakan pada tahun n	0.00		
					Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	258	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	1.00
				37.00				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Jumlah perusahaan pada tahun n			
					-	-		
			259	Data tingkat produktivitas total	Data tingkat produktivitas total (Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)).	1.00	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					-	-		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	260	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n	25.00	67.57%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					37.00			
					Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih			
					-			
			261	2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n	1.00	50.00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB	2.00		
			262	3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan sebanyak .....	2.00	2.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-		
			263	4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah...	37.00	100.00 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Jumlah Perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)	37.00		
					-	-		
			264	5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	37.00	100.00 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	37.00		
			265	6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	0.00	NaN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah perusahaan pada tahun n	0.00		
			266	7. Jumlah mogok kerja	Jumlah mogok kerja sebanyak .....	Nihil	Nihil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			267	8. Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah penutupan perusahaan sebanyak .....	Nihil	Nihil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					-	-		
			268	9. Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah perselisihan kepentingan sebanyak .....	Nihil	Nihil	Dinas Perindustrian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
					-	-		dan Perdagangan
			269	10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan sebanyak .....	Nihil	Nihil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					-	-		
			270	11. Jumlah perselisihan PHK	Jumlah perselisihan PHK sebanyak .....	Nihil	Nihil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					-	-		
			271	12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK sebanyak .....	Nihil	Nihil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					-	-		
			272	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite sebanyak .....	Nihil	Nihil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					-	-		
			273	14. Lembag Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Lembag Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Nihil	Nihil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					-	-		
			274	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian bersama	0.00	NaN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah kasus perselisihan	0.00		
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	275	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota sebanyak .....	4281.00	4281.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						-	-	
			276	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota sebanyak .....	1337.00	1337.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						-	-	
			277	3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota sebanyak .....	31.00	31.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						-	-	
			278	4. Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota sebanyak .....	12.00	12.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					-	-		
		279	5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sebanyak .....	Nihil	Nihil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					-	-		
		280	6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota sebanyak .....	Nihil	Nihil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1			281	7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota sebanyak .....	Nihil	Nihil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						-		
			282	8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Onlien (SISNAKER)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Onlien (SISNAKER) sebanyak .....	375.00	375.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						-		
			283	9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	0.00	NaN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						0.00		
					Jumlah CPMI/CTKI			
						-		
			284	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata sebanyak .....	20.00	20.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						-		
			285	11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan		100.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			49.00					
			49.00					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Jumlah PMI yang pulang			
					-	-		
			286	12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah PMI dan TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	96.00	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						96.00		
					- X 100% Jumlah PMI/TKI			
					-	-		
			287	13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan	0.00	NaN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						0.00		
					Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya			
					-	-		
			288	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Jumlah LTSA yang terbentuk	1.00	14.285 7%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						7.00		
					Jumlah daerah kantong PMI/TKI			
					-	-		
8	<b>PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	289	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG sebanyak .....	93.00	93.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
						-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
		3	4	5	6	7	8		9
1			290	2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota sebanyak .....	29.00	29.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	
					-	-			
			291	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak sebanyak .....	0.00	0.00		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
					-	-			
			292	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal sebanyak .....	1.00	1.00		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
					-	-			
		293	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	5	100.0%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak		
					5				
				Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten/Kota					
				-	-				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
		3	4	5	6	7	8		9
1			294	4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	
					-	-			
			295	5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota) sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	
					-	-			
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	296	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan sebanyak .....	2.00	2.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
						-	-		
		297	2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih sebanyak .....	2.00	2.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak		
				-	-				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
			298	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan sebanyak .....	2.00	2.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
					-	-		
			299	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota sebanyak .....	2.00	2.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
					-	-		
			300	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
					-	-		
			301	6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			302	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	20.00	100%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	
						20.00			
					Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan				
					-	-			
9	<b>PANGAN</b>	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	303	1. tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1.00	1.00	Dinas Pangan	
				304	2. terselurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	terselurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1.00	1.00	Dinas Pangan
				305	3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	1.00	1.00	Dinas Pangan
			306	4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1.00	1.00	Dinas Pangan	
			307	5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1.00	1.00	Dinas Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-		
			308	6. Tertanganinya kerawanan pangan	Tertanganinya kerawanan pangan	1.00	1.00	Dinas Pangan
					-	-		
			309	7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	1.00	1.00	Dinas Pangan
					-	-		
			310	8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1.00	1.00	Dinas Pangan
					-	-		
10	<b>PERTANAHAN</b>	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	311	1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	0.0001	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					- X 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	0.0001		
					-	-		
			312	2. SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	0.0001	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data				
		3	4	5	6	7	8		9			
					- X 100% Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform	0.0001						
					-							
				313	3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan mksimum/absentee	0.0001		100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					- X 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	0.0001						
				314	4. Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak	0.0001		100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					-----							
					- X 100% Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	0.0001						
315	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	3.00	150%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan							

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					- X 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	2.00		Pertanahan
					-	-		
11	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	316	1. Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap:	Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap:	IKA : 47,50 IKU : 91,89 ITH : 75,80	IKA : 47,50 IKU : 91,89IT H : 75,80	Dinas Lingkungan Hidup
				a) Indeks Kualitas air (IKA)	a) Indeks Kualitas air (IKA)			
				b) Indeks Kualitas Udara (IKU)	b) Indeks Kualitas Udara (IKU)			
				c) Indeks tutupan hutan (ITH)	c) Indeks tutupan hutan (ITH)			
					-	-		
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	317	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	1.00	100%	Dinas Lingkungan Hidup
					2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	1.00		
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	318	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	151.00	100%	Dinas Lingkungan Hidup
						151.00		
					Jumlah usulan permohonan yang terregistrasi			
					-	-		
			319	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
						151.00		
					100 % Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota			
			320	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Jumlah MHA yang diakui	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
					- X 100% Jumlah usulan MHA	0.00		
					-	-		
			321	4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
		- 100% Jumlah MHA yang ada			0.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
		3	4	5	6	7	8		9
			322	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup	
					- X 100% target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat				
					-	-			
			323	6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	pengaduan masyarakat yang ditangani		100%		Dinas Lingkungan Hidup
						4.00			
						4.00			
- X 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi									
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	324	1. Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	6.00	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						6.00			
					- X 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan				
					-	-			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data		
		3	4	5	6	7	8		9	
			325	2. Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	1.00	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
						1.00				
					- X 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan					
			326	3. Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	23697.00	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
						23697.00				
					- X 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan					
			327	4. Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dalam satu tahun	17.00	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	17.00									
- X 100% 2 (kali)										
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	328	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa sebanyak .....	24.00	24.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
						-				
			329	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa tahun sebelumnya	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa tahun sebelumnya sebanyak .....	24.00	24.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	-									

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
		3	4	5	6	7	8		9
1			330	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan sebanyak .....	131.00	131.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
						-			
			331	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan sebanyak .....	129.00	129.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
						-			
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	332	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa sebanyak .....	24.00	24.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
						-			
			333	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya sebanyak .....	24.00	24.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
						-			
			334	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan sebanyak .....	131.00	131.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
					-	-		
			335	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan sebanyak .....	129.00	129.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
					-	-		
14	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	TFR (Angka Kelahiran Total)	336	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1.00	1.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
					-	-		
			337	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	37.62	37.62	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
					-	-		
			338	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	34.46	34.46	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
					-	-		Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			339	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	218062.0 0	39.589 %	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
					Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	550813.0 0		
					-	-		
			340	5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK sebanyak .....	2280.00	2280.0 0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
					-	-		
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	341	1. Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	36.00 36.00	100%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
					Jumlah faskes			
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			342	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif	25677.00	25.480 %	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
						100773.00		
				Jumlah pasangan usia subur		-		
			343	3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPk yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPk yang efektif sebanyak .....	4580.00	4580.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
						-		
			344	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern	794.00	9.1919 %	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
						8638.00		
				Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan				
				KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data				
		3	4	5	6	7	8					
1		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	345	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	7.02	7.02	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak				
					-	-						
					346	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)			Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	22194.00	73.97%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
									Jumlah keluarga PBI	30004		
									Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.			
-	-											
15	<b>PERHUBUNGAN</b>	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	347	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia	108.00 175.00	61.71%	Dinas Perhubungan				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan			
					-	-		
			348	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	4400.00	86%	Dinas Perhubungan
					Jumlah kendaraan wajib uji	5110.00		
					-	-		
			349	3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	84.00	100%	Dinas Perhubungan
					Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota	84.00		
					-	-		
			350	4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	1196.00	5.9968 %	Dinas Perhubungan
						19944.00		
					Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota			
					-	-		
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	351	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota	1196.00	5.9968 %	Dinas Perhubungan
						19944.00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota			
					-	-		
16	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	352	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	8.00	18.60%	Dinas Komunikasi dan Informatika
						43.00		
					Jumlah Perangkat Daerah			
					-	-		
			353	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	14.00	32.56	Dinas Komunikasi dan Informatika
						43.00		
					Jumlah Perangkat Daerah			
					-	-		
			354	3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).	1.00	1.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	355	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	1.00	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
									1.00	
									Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	
									-	-
			356	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	43.00	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
									43.00	
									Jumlah Perangkat Daerah	
									-	-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			357	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	43.00 43.00	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Jumlah Perangkat Daerah			
					-	-		
			358	4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	15.00 15.00	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Jumlah Layanan			
					-	-		
			359	5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	9.00 9.00	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Jumlah layanan			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-		
			360	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	14.00	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				-----	14.00			
				Jumlah sistem elektronik				
				-	-			
			361	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		25.58%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				layanan publik dan layanan administrasi				
				-	-			
			362	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	11.00	25.58%	Dinas Komunikasi dan Informatika
					43.00			
				Jumlah perangkat daerah				
				-	-			
			363	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	11.00	25.58%	Dinas Komunikasi dan Informatika
					43.00			
				Jumlah perangkat daerah				
				-	-			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			364	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	30.00	69.767 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
						43.00		
					Jumlah perangkat daerah			
					-	-		
			365	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	10.00	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah	10.00		
					-	-		
			366	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	10.00	23.256 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
						43.00		
					Jumlah perangkat daerah			
					-	-		
			367	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	2.00	8.33%	Dinas Komunikasi dan Informatika
						24.00		
					Jumlah ASN pengelola TIK			
					-	-		
368	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait	(Ada atau Tidak ada):	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan			
		1. Dokumen Master Plan						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				implementasi e-government	Poin dalam master plan paling sedikit memuat: § Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran § Penganggaran § Strategi § Peta Jalan § Arah Kebijakan § Cetak biru teknis/Peta rencana strategi  2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer):  - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab  -			Informatika
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	369	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	-	17.00 60.00	28.33%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
		3	4	5	6	7	8		9
					Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota				
			370	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	3208.00	100%		Dinas Komunikasi dan Informatika
					Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/kota	3208.00			
			371	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP	582.00	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	582.00			
17	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	372	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	16.00	4.92%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				daerah kabupaten/kota		325.00		
					Jumlah koperasi yang ada			
					-	-		
			373	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan		NaN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						Nihil		
						Nihil		
					Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan			
					-	-		
			374	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	40.00	7.722%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						518.00		
					Jumlah koperasi yang ada			
					-	-		
			375	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	6.00	1.1583 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						518.00		
					Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-		
			376	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	105.00	20.27%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						518.00		
					Jumlah koperasi yang ada			
					-	-		
			377	6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	260.00	0.2744 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						94739.00		
					Jumlah anggota koperasi yang ada			
					-	-		
			378	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	Nihil	NaN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						Nihil		
					Jumlah koperasi yang ada			
					-	-		
			379	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan (tidak perlu diisi)	9.00	9.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			380	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	83.00	16.023 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				kabupaten/kota		518.00		
					Jumlah koperasi yang ada			
					-	-		
			381	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	9.00	1.737%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						518.00		
					Jumlah koperasi yang ada			
					-	-		
			382	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	8.00	1.544%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						518.00		
					Jumlah koperasi yang ada			
					-	-		
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	383	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	1250.00	62.50%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						2000.00		
					Jumlah wirausaha yang ada			
					-	-		
			384	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system only data system (ODS)	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	Nihil	NaN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						Nihil		
					Jumlah usaha mikro yang ada			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-		
			385	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	jumlah usaha mikro yang bermitra	40.00	0.16%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						25000.00		
					Jumlah usaha mikro yang ada			
					-	-		
			386	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	815.00	3.3698 6%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						24185.00		
					Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk			
					-	-		
			387	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	125	0.0050 251	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						24875.00		
					Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran			
					-	-		
			388	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	608	2.432%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						25000.00		
					Jumlah usaha mikro yang ada			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-		
			389	7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha pendampingan	940 25000.00	3.76%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Jumlah usaha mikro yang ada			
					-	-		
18	<b>PENANAMAN MODAL</b>	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	390	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					-	-		
			391	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	0.00	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					-	-		
			392	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					-	-		
			393	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			394	5. Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					-	-		
			395	6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					-	-		
			396	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebanyak .....	297.00	297.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					-	-		
			397	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan sebanyak .....	2217.00	2217.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					-	-	0	
			398	9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak .....	6712143 82934.00	671,21 4,382,934	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			399	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebanyak .....	25 Aparatur dan 384 Pelaku Usaha	25 Aparatur dan 384 Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					-	-		
			400	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal sebanyak .....	254.00	254.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					-	-		
			401	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima sebanyak .....	72.00	72.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					-	-		
19	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	402	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	40	40.00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					-	-		
		Peningkatan prestasi olahraga	403	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan sebanyak .....	144.00	144.00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga			
					-	-		
			404	2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah sebanyak .....	34.00	34.00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					-	-		
20	<b>STATISTIK</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	405	1. Tersedianya buku profil daerah	Tersedianya buku profil daerah	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
						-	-	
			406	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						-	-	
			407	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						-	-	
			408	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
					-	-		
		409	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS sebanyak .....	1.00	1.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					-	-		
		410	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral				Dinas Komunikasi dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Informatika
					Jumlah kegiatan statistik sektoral			
					-	-		
			411	7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata Indikator statistik sektoral			
					Jumlah indikator statistik sektoral			
					-	-		
21	<b>PERSANDIAN</b>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	412	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	1.00	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Jumlah kegiatan strategis yang ada	1.00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<p>Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain</p>			
					<p>Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis, Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan</p>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			413	2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	-		Dinas Komunikasi dan Informatika
					Jumlah SE yang ada			
					Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan			
					Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi.			
					Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai			
					-		-	
			414	3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah			Dinas Komunikasi dan Informatika
					Jumlah SE yang ada			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan			
			415	4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Jumlah titik teramankan	-		Dinas Komunikasi dan Informatika
					Jumlah titik pada PHKS			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1				(PHKS) yang ditetapkan	<p>Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi. PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS.</p> <p>JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi</p> <p>Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi</p>			
					-			-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	416	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) sebanyak .....	11.00	11.00	Dinas Pendidikan
					-	-		
			417	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya) sebanyak .....	11.00	11.00	Dinas Pendidikan
					-	-		
			418	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan sebanyak .....	11.00	11.00	Dinas Pendidikan
					-	-		
-	-	-	-					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data		
		3	4	5	6	7	8		9	
1			419	4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pendidikan		
			420	5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringktan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pendidikan		
			421	6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar) sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pendidikan		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
			422	7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pendidikan
					-	-		
			423	8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pendidikan
					-	-		
			424	9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pendidikan
					-	-		
		425	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan) sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pendidikan	
				-	-			
		426	11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan	Jumlah pengunjung museum sebanyak .....	314.00	314.00	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
		3	4	5	6	7	8		9
				pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.					
			427	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya kabupaten/kota	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya sebanyak .....	-	0.00	0.00	Dinas Pendidikan
			428	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB sebanyak .....	-	0.00	0.00	Dinas Pendidikan
			429	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi sebanyak .....	-	0.00	0.00	Dinas Pendidikan
			430	16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum sebanyak .....	-	9.00	9.00	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-		
			431	17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pendidikan
					-	-		
			432	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) sebanyak .....	1186.00	1186.00	Dinas Pendidikan
					-	-		
			433	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Pendidikan
					-	-		
23	<b>PERPUSTAKAAN</b>	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	434	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	2561155.00	436.98%	Dinas Perpustakaan
					Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	586110.00		
					-	-		
			435	2. Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site	7539.00	1.286%	Dinas Perpustakaan
					Jumlah penduduk di wilayahnya	586110.00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			436	3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	832.00	0.1419 5%	Dinas Perpustakaan
						586110.00		
					Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)			
					-	-		
			437	4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	104.00	12.5%	Dinas Perpustakaan
						832.00		
					Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya			
					Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.			
					-	-		
			438	5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	0.00	0.00	Dinas Perpustakaan
						-		
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data	
		3	4	5	6	7	8		9
1		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	439	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0.00	0.00	Dinas Perpustakaan	
						-			
			440	2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa sebanyak ..... (Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan)	0.00	0.00	Dinas Perpustakaan	
					-				
			441	3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
					Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan			
24	<b>KEARSIPAN</b>	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	442	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	-	100%	Dinas Perpustakaan
					Jumlah seluruh arsip aktif Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item	10.00	10.00	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012	-		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	443	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	0.00	0.00	Dinas Perpustakaan
					-	-		
			444	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	75.00	75.00	Dinas Perpustakaan
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			445	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	0.00	0.00	Dinas Perpustakaan
					-	-		
			446	4. Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	75.00	75.00	Dinas Perpustakaan
					-	-		
			447	5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	78.00	78.00	Dinas Perpustakaan
					-	-		
			448	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	78.00	78.00	Dinas Perpustakaan
					-	-		
25	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	449	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) sebanyak .....	632.00	0.00	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-		
			450	2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional	6.00	100%	Dinas Perikanan
					Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kab/kota	6.00		
					-	-		
			451	3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	28.00	28.00	Dinas Perikanan
			452	4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun sebanyak .....	60.00	0.00	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
				dan penguatan kelembagaan				
			453	5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun sebanyak .....	5585.00	-	Dinas Perikanan
26	<b>PARIWISATA</b>	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	454	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi sebanyak .....	103.00	103.00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan			dan Olahraga
					Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta			
					-	-		
			455	2.Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebanyak .....	1198.00	1198.00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					• Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian		0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata</li> </ul>			
			456	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota sebanyak .....	91.00	91.00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					o Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha :			
					• Daya Tarik usaha			
					• Kawasan pariwisata			
					• Jasa transportasi wisata			
					• Jasa perjalanan wisata			
					• Jasa makanan dan minuman			
					• Penyediaan akomodasi			
					• Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran</li> <li>• Jasa informasi pariwisata</li> <li>• Jasa konsultan pariwisata</li> <li>• Jasa pramuwisata</li> <li>• Wisata tirta</li> <li>• Spa</li> </ul>			
			457	4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	215.00	834419.00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					-	-		
			458	5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri dilakukan sebanyak ..... (Bisa sebagai peserta atau penyelenggara)	5.00	5.00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					-	-		
			459	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota sebanyak.....(Bisa sebagai peserta atau penyelenggara)	0.00	0.00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					-	-		
			460	7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri sebanyak .....	91.00	100%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	91.00		
					-	-		
			461	8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	163.00	83.589 7%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					Jumlah tenaga kerja pariwisata	195.00		
					Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi			
					-	-		
			462	9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	360.00	100%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	360.00		
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
			463	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat sebanyak .....	26.00	26.00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					-	-		
27	<b>PERTANIAN</b>	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	464	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan sebanyak .....	215.00	215.00	Dinas Pertanian
					-	-		
			465	2. Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan sebanyak .....	135.00	135.00	Dinas Pertanian
					-	-		
			466	3. Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian sebanyak .....	2.00	2.00	Dinas Pertanian
					-	-		
			467	4. Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	135.00	100%	Dinas Pertanian
					Jumlah prasarana yang dibangun	135.00		
					-	-		
			468	5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	2.00	100%	Dinas Pertanian
					Jumlah usulan usaha pertanian	2.00		
					-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	469	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	2.00	5%	Dinas Pertanian
					Luas area terkena bencana	38.00		
					Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular			
					-	-		
29	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	474	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota sebanyak .....	0.00	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					-	-		
30	<b>PERDAGANGAN</b>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	475	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin:	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	100.00	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				a. Pusat Perbelanjaan				
				b. Toko Swalayan	Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	100.00		
					-	-		
			476	2. Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	5.00	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
					Jumlah permohonan penerbitan TDG	5.00		
					-	-		
			477	3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	5.00	3.7879 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah gudang yang ada di kab/kota	132.00		
					-	-		
			478	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	Nihil	NaN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri				
				b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri		Nihil		
				c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
			479	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	- jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	- 3.00	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer	3.00		
			480	6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam)	Nihil	NaN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	Nihil		
			481	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	- $K = (a + b) \times 100\%$	- 17.00	17.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
					K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya			
					a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)			
					b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)			
					-	-		
			482	8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	0.00	0.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					-	-		
		Persentase kinerja pupuk	483	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/(bxc) \times 100$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	52.00	52.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						-		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	484	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	544.00	27%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
					Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab / Kota	2005.00		
					-	-		
			485	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	100.00	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	100.00		
					-	-		
31	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	486	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	Nihil	Nihil	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	Nihil		
			487	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft	30.00	30.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1		indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK			Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	-		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	488	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	17.00	100%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	17.00		
					-	-		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	489	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	Nihil	NaN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	Nihil		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1								
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	490	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	- Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di SIINas  Total Populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota	- Nihil  Nihil	NaN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
32	<b>TRANSMIGRASI</b>	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	491	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	- Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	- Nihil	Nihil	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						-		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja		Sumber Data
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			492	2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya sebanyak ..... (Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga)	Nihil	Nihil	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			493	3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Jumlah satuan pemukiman yang dibina sebanyak .....	Nihil	Nihil	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

### **2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil**

Indikator Kinerja Kunci Hasil merupakan capaian dari kinerja indikator kinerja keluaran yang menggambarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten. Secara lengkap Indikator Kinerja Kunci Hasil sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3**

Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) Memuat Capaian Kinerja Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>1. PENDIDIKAN</b>						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	14,531.00	86.31%	Dinas Pendidikan	
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	16,835.00			
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	42,885.00	99.99%	Dinas Pendidikan	
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	42,889.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	20,823.00	90.14%	Dinas Pendidikan	
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	23,101.00			
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	2405	68.52%	Dinas Pendidikan	
		jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	3510			
<b>2. KESEHATAN</b>						
5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	293	52.59	Dinas Kesehatan	
		Jumlah Penduduk di Kabupaten	557.164			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	2	66.67	Dinas Kesehatan	
		Jumlah RS di Kabupaten	3			
7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6,153.00	90.02	Dinas Kesehatan	
		Jumlah ibu hamil di Kabupaten	6,835.00			
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	5,994.00	91.86	Dinas Kesehatan	
		jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	6,525.00			
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	5,676.00	86.54%	Dinas Kesehatan	
		Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten	6,559.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3	4			
1	2	3	4	5	6	
10	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	24,405.00	95.12	Dinas Kesehatan	
		Jumlah balita di Kabupaten	25,657.00			
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	59,188.00	95.22	Dinas Kesehatan	
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten	62,157.00			
12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	216,085.00	64.57	Dinas Kesehatan	
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten	334,653.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,279.00	68.70	Dinas Kesehatan	
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten	122,678.00			
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85,654.00	43.56	Dinas Kesehatan	
		Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten	196,652.00			
15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7,320.00	100.00	Dinas Kesehatan	
		Jumlah penderita DM di Kabupaten	7,320.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3	4			
1	2	3	4	5	6	
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1126	100.00	Dinas Kesehatan	
		Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	1,126.00			
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2,284.00	44.32	Dinas Kesehatan	
		Jumlah penderita TBC di Kabupaten	5,154.00			
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	15,740.00	100.00	Dinas Kesehatan	
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten	15,740.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
<b>3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
19	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	0	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	0.00			
20	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	0.00	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
	pantai di WS kewenangan kab	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten	0.00			
21	Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	5,045.00	60.97%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten	8,274.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	362,663.00	61.88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut.	586,110.00			
23	persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	139354	95.10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
		Jumlah rumah di kabupaten	146528			
24	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	109	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Jumlah IMB yang berlaku	109			
25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	543,132.00	68.06%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		panjang jalan keseluruhan diwilayah kab	798,000.00			
26	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	62	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten	62			
27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	467			
<b>4. PERUMAHAN RAKYAT</b>						
28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	6	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	6			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	160651	100.00%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	160651			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3	4			
1	2	3	4	5	6	
30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	8.6	3.02%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	284.8			
31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni	19152	11.92	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Jumlah total unit rumah Kabupaten	160,651.00			
32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun dan atau sudah terfasilitasi PSU	744.00	0.46%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	
		Jumlah unit rumah Kabupaten	160,651.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
					Pertanahan	
<b>5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						
33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	84	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	84			
34	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	41	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuatsanksi	41			
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	586,110.00	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
		Jumlah Warga Negara yang berada di Kawasan Rawan Bencana di wilayah Kabupaten	586,110.00			
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16,295.00	2.78	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Jumlah Warga Negara yang berada di Kawasan Rawan Bencana di wilayah Kabupaten	586,110.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	30.00	6.09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Jumlah Keseluruhan Korban Bencana di Suatu Kab/Kabupaten	493.00			
38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	24	100	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten	24			
39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	response time	15 Menit	15 Menit	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)	0			
<b>6. SOSIAL</b>						
40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	912.00	100	Dinas Sosial	
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	912.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	334	100	Dinas Sosial	
		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	334			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>7. TENAGA KERJA</b>						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3	4			
1	2	3	4	5	6	
42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	1	100	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	1			
43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	368	0.10	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan	357946			
44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	108,379	30.28%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah tenaga kerja	357946			
45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	26	70.27	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		Jumlah Perusahaan	37			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
	Ketenagakerjaan).					
46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	800	59.84	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		Jumlah pencaker yang terdaftar	1,337.00			
<b>8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	10,766,273,465	1.08%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	
		Jumlah seluruh belanja langsung APBD	994,356,359,755			
48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi	5	0.00%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
		Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	137,192.00		Perlindungan Anak	
49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	20	0.01	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	
		Jumlah penduduk perempuan	361,557.00			
<b>9. PANGAN</b>						
50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	124409.25	260.78%	Dinas Pangan	
		Jumlah kebutuhan pangan	47706.42			
<b>10. PERTANAHAN</b>						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3	4			
1	2	3	4	5	6	
51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	0.001	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	0.001			
52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	2.00	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	2.00			
53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	0.001	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Luas izin lokasi yang diterbitkan	0.001			
54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL)	0.001	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Jumlah penerima tanah obyek landreform	0.001			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	0.001	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	0.001			
56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	0.001	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	0.001			
<b>11. LINGKUNGAN HIDUP</b>						
57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKLH Kabupaten = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%).	71.68	71.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			0			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3	4			
58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Total Vol sampah yang dapat ditangani	32.97	0.0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Total Volume Timbunan sampah kabupaten	33.72			
59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	100			
<b>12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	480,976.00	99.81	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terpadu (Perekaman KTP-el) di 20 Desa/Kelurahan dan pelayanan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan. Maka capaian kinerja akhir tahun 2021 mencapai 99.80% atau 480.976 Dokumen dan mengalami (peningkatan/penurunan/sama)
		Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	481,907.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
						sebesar 0.37% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.
61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	55,921.00	45.40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian Indikator or Kinerja Penerbitan KIA pada tahun 2021 sebesar 30.00 % atau mencapai 45.4

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
		Jumlah anak usia 0-17 tahun	123,169.00			0% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut (sudah/belum) mencapai target RPJMD tahun 2021, (dikarenakan/di capai melalui) '- Pelayan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pacitan Maka capaian kinerja akhir tahun 2021 mencapai 100 % atau 55.921 D okumen dan mengalami

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
						(peningkatan/p enurunan/sama ) apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
62	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	128,869.00	95.61	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indikator penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun pada tahun 2021 mencapai 95.60% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut (sudah/belum)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
		Jumlah anak usia 0-18 tahun	134,789.00			mencapai target RPJMD tahun 2021, (dikarenakan/di capai melalui) '- Adanya kegiatan Pelayanan Terpadu Sidang langsung di Desa (SILADES) ke Desa-Desa se Kabupaten Pacitan '- Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pacitan Maka capaian kinerja akhir tahun

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
						<p>2021 mencapai 95.60% atau 128.869 Dokumen dari jumlah anak usio 0-18 tahun mencapai 134.789 jiwa dan mengalami (peningkatan/penurunan/sama) apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	5	11.36%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indikator pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama pada Tahun 2021 (sudah/belum) melaksanakan 5 OPD
		Jumlah OPD	44			
<b>13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
64	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	1	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
		Jumlah desa Tertinggal (per awal tahun 2020)	1			Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020, tentang Perubahan ketiga atas keputusan Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdaaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016, tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, Kabupaten Pacitan tahun 2020 tidak terdapat Desa dengan Status

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
						Tertinggal.
65	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	4	4.65%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Desa Dan Perdesaan nomor 398.4.1 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)	86			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
						Desa Nomoe 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, Di Kabupaten Pacitan terdapat 86 Desa yang berstatus Berkembang, 76 Desa berstatus Maju, dan 4 Desa berstatus Mandiri.
<b>14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
66	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total) $5\sum ASFR$	2.01	2.01	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
			0		Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	
67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Jumlah peserta KB Aktif Modern	76,816.00	76.23%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	
		Jumlah Pasangan Usia Subur	100,773.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	10,332.00	10.25	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	
		Jumlah Pasangan Usia Subur	100,773.00			
<b>15. PERHUBUNGAN</b>						
69	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan)	0.7	0.7	Dinas Perhubungan	
			0			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
70	Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0.24	0.24	Dinas Perhubungan	
			0			
<b>16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	8	18.60%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah OPD	43			
72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	13	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Layanan Publik	13			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
73	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	457,730.00	77.70%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Penduduk	589108			
<b>17. KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>						
74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	188	36.29%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		Jumlah seluruh koperasi	518			
75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun (n-1) ) di Kabupaten	1250	5.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
		Jumlah investasi tahun (n-1) di Kabupaten	25000			
<b>18. PENANAMAN MODAL</b>						
76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(Jumlah investasi tahun 2020 - jumlah investasi tahun 2019) di Kabupaten	254,885,052,908	61.22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Jumlah investasi tahun 2019 di Kabupaten	416,329,330,025.00			
<b>19. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						
77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	dalam kegiatan ekonomi mandiri Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten	2,825.00	2.32	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Pemuda berwirausaha= 2.825 Jumlah Pemuda Kab.Pacitan (sumber sensus penduduk dr BPS)= 121.987 Dengan Rincian sbb: umur 15-29 tahun= 39.374 umur 20-24
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten	121987			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3	4			
1	2	3	4	5	6	
						tahun= 42.150 umur 25-29 tahun= 40.463
78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten	7630	6.25%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	jumlah pemuda yang aktif diorganisasi kepemudaan maupun masyarakat
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	121987			
79	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	44	44	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Medali EMas= 22 Medali Perak= 13 Medali Perunggu= 9
			0			
<b>20. STATISTIK</b>						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	30	69.77	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah OPD	43			
81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	30	69.77%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah OPD	43			
<b>21. PERSANDIAN</b>						
82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi		0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah area penilaian				
<b>22. KEBUDAYAAN</b>						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	1,141.00	96.21	Dinas Pendidikan	
		Jumlah cagar budaya yang terdata	1186			
<b>23. PERPUSTAKAAN</b>						
84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	58.87	58.00	Dinas Perpustakaan	
			0			
85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	4.68	4.00	Dinas Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
			0			
<b>24. KEARSIPAN</b>						
86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a+i+s+j)/4$	74.24	74	Dinas Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
			0			
87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$	51	51	Dinas Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
			0			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						
<b>25. KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (Ton) (sumber data: one data KKP)	14,770,659.00	14.77	Dinas Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan 2021
			0.00			
<b>26. PARIWISATA</b>						
89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun (n-1)	110.00	104.76	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	WISMAN= wisatawan mancanegara
		Jumlah wisatawan tahun (n-1)	105			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun (n-1))	-115,497.00	-13.43	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	WISNUS adalah wisatawan nusantara
		Jumlah wisatawan tahun (n-1)	860292			
91	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	5,449.00	637.31	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kamar yang tersedia	855			
92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi PDRB (dalam satuan Rupiah) dari sektor Pariwisata	4,835,091,000.00	0%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	DISPARBUDP ORA menghitung Kontribusi PAD dari sektor Pariwisata
		Jumlah total PDRB (dalam satuan Rupiah)				
93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,835,091,000	0%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Parpora menghitung PAD dari sektor

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
		Jumlah total PAD				Pariwisata tahun 2021
<b>27. PERTANIAN</b>						
94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton)	88,982.10	101.97%	Dinas Pertanian	
		Luas panen (ha)	87265			
95	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan N – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (N-1)	-104	-3.60%	Dinas Pertanian	
		Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (Tahun N-1)	2887			
<b>28. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>						
96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	0	0	Dinas Penanaman Modal dan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
	Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	0		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
<b>29. PERDAGANGAN</b>						
97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	17.00	32.69	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten	52			
98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	24,381,516.00	64.65	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		RDKK	37,714,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
99	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	2005	368.57%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten	544.00			
<b>30. PERINDUSTRIAN</b>						
100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	(jumlah industri kecil dan menengah tahun N - Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (N-1))	11791	97.70	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	12,069.00			
101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan	Jumlah Jenis Industri Prioritas Kabupaten	Nihil	0	Dinas Perindustrian	RPIK masih dalam proses

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
	industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional/Provinsi (10 Jenis)	Nihil		dan Perdagangan	ditahun 2022
10 2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI)	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	17	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3	4			
1	2	3	4	5	6	
	Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dikeluarkan	17			
10 3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Nihil	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tidak ada pengajuan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3	4			
		Jumlah izin yang dikeluarkan	Nihil			
104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Nihil		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	tidak ada kawasan industri
		Jumlah izin yang dikeluarkan	Nihil			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
10 5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	95	95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			0			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	

### **2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan secara lengkap dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**

Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) Memuat Capaian Kinerja Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
<b>PERENCANAAN KEUANGAN</b>					
1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	487,104,476,854.00	30.25%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah APBD	1,610,281,291,593.25		
2	Rasio PAD	Jumlah PAD	Rp 211,683,561,420	13.15%	Badan Pendapatan Daerah
		Jumlah PDRB Non Migas	Rp 1,610,333,665,584		
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	3	Inspektorat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	Inspektorat
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan- transfer expenditures	1,610,281,291,593.25	94.31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah belanja APBD	1,707,353,800,414.00		
6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PENGADAAN					
7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun N			Sekretariat Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Jumlah kontrak keseluruhan tahun N			
8	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif			Sekretariat Daerah
		Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif			
9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan			Sekretariat Daerah
		Total belanja langsung			
<b>KEPEGAWAIAN</b>					
10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	934	83.77%	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	1,115.00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
11	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	159	7.76%	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2,049.00		
12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	145	91.19%	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	159		
<b>MANAJEMEN KEUANGAN</b>					
13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	Nilai Absolut dari Total belanja dalam realisasi	1,610,281,291,593.25	96.42%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Total Belanja APBD sebelum perubahan	1670005796603		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
14	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	Nilai Absolut dari Total belanja dalam realisasi	1,695,124,683,282.75	103.27%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Total PAD dalam APBD sebelum perubahan	1,641,482,629,460.00		
15	Assets Management	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SILPA	181,401,426,519.17	14.62%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Total belanja anggaran tahun sebelumnya	1,240,751,375,585.89		
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya)	193,180,769,109.00	121.96%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya)	158,403,290,894.29		
18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	22		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Total jumlah dokumen yang telah dirinci (12 Dokumen) Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD			



## 2.1 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran keberhasilan capaian daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian kinerja. Secara lengkap capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat hal – hal sebagai berikut :

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016– 2021. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selain itu juga membandingkan dengan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya dalam periode ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :

- a). Nilai 85 s.d  $\geq$  100 kategori Sangat Baik;
- b). Nilai 75 s.d <85 kategori Baik;
- c). Nilai 65 s.d <75 kategori Cukup Baik;
- d). Nilai 50 s.d <65 kategori Sedang; dan
- e). Nilai 0 s.d <50 kategori Kurang.

Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan disusun menurut klasifikasi sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata pada tahun 2021 sebesar 73,34%. Capaian kinerja ini termasuk dalam kategori

“**CUKUPBAIK**”. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 17,24%. Penurunan ini terjadi disebabkan efek pandemi Covid 19 yang mengharuskan Perangkat Daerah untuk melakukan refocusing anggaran, yang berakibat kinerja perangkat daerah tidak berjalan secara optimal. Sebagai dampaknya, beberapa indikator tidak dapat dicapai secara maksimal seperti derajat kesehatan masyarakat, penurunan pengangguran, kinerja sektor industri dan sektor pertanian. Selain itu terdapat beberapa indikator yang tidak dapat diukur kinerjanya dengan optimal, antara lain opini BPK, Nilai Evaluasi SAKiP dan Nilai LPPD yang sampai dengan laporan ini disusun belum keluar hasil pemeriksaan dan evaluasinya. Beberapa hal tersebut menyebabkan rata – rata capaian kinerja pada tahun 2021 menjadi menurun.

Rincian capaian indikator kinerja per-sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021**

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
		2021	
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	77,12	Kurang
2	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	100,00	Kurang
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	100,33	Sangat Baik
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	-0,85	Sangat Baik
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	90,90	Sangat Baik
6	Menurunnya Pengangguran	-4,00	Cukup
7	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	91,03	Sangat Baik
8	Menguatnya Kondisi Perekonomian Daerah	94,34	Sangat Baik

9	Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi	86,94	Cukup Baik
---	---	-------	------------

1	2	3	4
10	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	-98,71	Kurang
11	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata Daerah	27,81	Kurang
12	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian	-36,25	Sangat Baik
13	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan	341,53	Sangat Baik
14	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dasar Yang Menjangkau Seluruh Wilayah	101,71	Sangat Baik
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	97,78	Sangat Baik
16	Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban	103,70	Sangat Baik
<b>Rata Rata Capaian Kinerja</b>		<b>73,34</b>	<b>Cukup Baik</b>

## B. PENGUKURAN KINERJA 2021

### PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021

**VISI : MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT**

**MISI 1 : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN AKUNTABEL**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima	Persentase SKPD dengan hasil survey IKM minimal baik	100
		Indeks SPBE	Baik
2.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
		Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Baik
		Nilai LPPD	Tinggi

**MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KEHIDUPAN  
SOSIAL MASYARAKAT**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>		<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,5
		Harapan lama sekolah	12,74
		Nilai rata-rata ujian:	
		- SD	78,64
		- SMP	83,26
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71,33
		Angka kematian Ibu	76,42
		Angka kematian bayi	7,64
		Prevalensi balita gizi buruk	0,19
3.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	13,85
4.	Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	1,
5.	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	prosentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial	15,5

**MISI 3 : MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN  
MENGGERAKKAN POTENSI DAERAH DIDUKUNG  
KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>		<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Menguatnya kondisi perekonomian daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	5,82
		Tingkat inflasi	6,03
		PDRB per kapita	37.622.338
2.	Meningkatnya Kemandirian usaha mikro dan koperasi	Prosentase Koperasi mandiri	2,42
		Prosentase Peningkatan Wira Usaha Baru	3,97

3.	Meningkatnya kinerja sektor industri	Persentase pertumbuhan industri	2,33
4.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	2.000.000
5.	Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian dan perikanan	3,89
6.	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	91,5
7.	Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	65,93
		Persentase penduduk berakses air bersih	60,75
8.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	73,31

**MISI 4 : MENINGKATKAN KESALEHAN SOSIAL DAN HARMONISASI ANTAR SELURUH LAPISAN MASYARAKAT**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban	Jumlah konflik bernuansa SARA	0
		Angka kriminalitas	1,1
		Persentase penyelesaian pelanggaran keamanan dan ketertiban	97

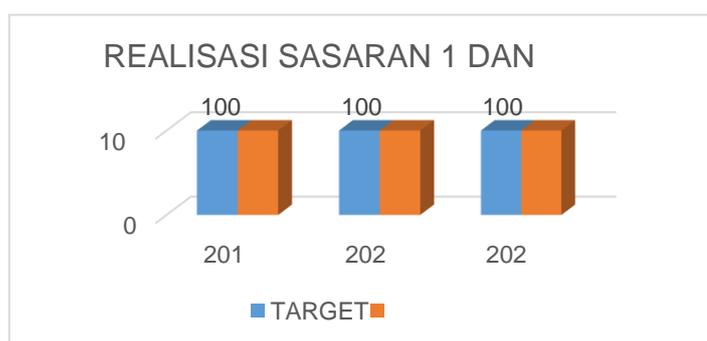
**MISI I : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,  
EFEKTIF DAN AKUNTABEL**

**TUJUAN 1 : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG  
PROFESIONAL DAN MENERAPAKAN GOOD  
GOVERNANCE**

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 1 **“Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima”** dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Capaian Indikator **“Persentase Perangkat Daerah Dengan Hasil Survei IKM Minimal Baik”** pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 100%. Sedangkan Target Perangkat Daerah dengan hasil survey IKM minimal baik tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 1 Indikator 1 termasuk kategori **“Sangat baik”**(100%).

**Tabel Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 1**

No	Indikator	Realisasi RPJMD		Kinerja 2021	
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PD dengan hasil survei IKM minimal baik	100	100	100	100



Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penataan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan

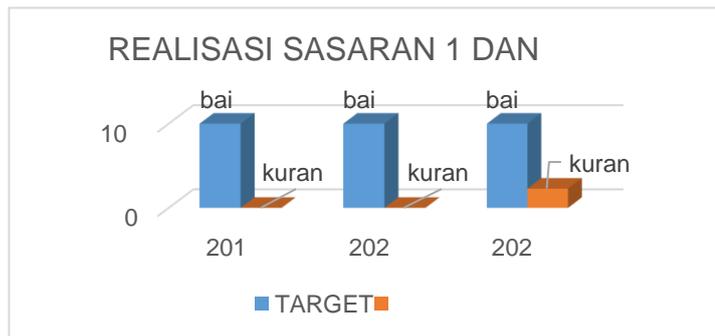
Penataan Organisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Dokumen laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  - perangkat daerah yang nilai IKM nya baik dan meningkat nilainya
  - jumlah unit pelayanan dengan nilai indeks pelayanan publik baik
  - % fasilitasi dan koordinasi bidang pelayanan publik dan tata laksana
  - % perangkat daerah yang menyusun dan menerapkan SOP sesuai dengan proses bisnis
- b. Capaian Indikator “ **Pemeringkatan E-Government (PeGi)**” Pemeringkatan E Government (PeGi) terakhir dilakukan penilaian pada tahun 2017 dan sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan dengan indicator “**Pemeringkatan E-Government (PeGi)**” diubah menjadi “**Indeks SPBE**”. Untuk pengukuran pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menggunakan indicator Indeks SPBE.
- c. Capaian Indikator “**Indeks SPBE**” pada 2019 dicapai dengan nilai kurang, sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2020 tidak dapat dilakukan karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi selaku lembaga yang melakukan penilaian hanya melakukan penilaian secara sampling, dan Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak termasuk di

dalamnya. Pada tahun 2021 capaian indicator indeks SPBE sebesar 1,41 atau predikat kurang.

**Tabel Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 3**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks SPBE	Tidak dinilai	Baik	kurang	kurang



Tidak tercapainya target Indeks SPBE dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pacitan disebabkan oleh :

- Kurangnya komitmen pimpinan dalam penerapan SPBE
- Belum terpenuhinya SDM SPBE yang memiliki kompetensi SPBE untuk mendukung penerapan SPBE
- Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi SPBE
- Masterplan TIK di Daerah belum memenuhi unsur-unsur SPBE
- Masterplan/ Rencana Induk belum selaras dengan RPJM Daerah
- Belum ada landasan kebijakan yang mengatur fungsi dan layanan SPBE
- Kurangnya peran tim koordinasi
- Masih banyaknya pengelolaan sistem elektronik yang dilakukan secara terpisah oleh masing – masing OPD

Mencermati beberapa penyebab tersebut diatas, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain :

- Melaksanakan penguatan kapasitas SDM pengelola SPBE
- Menyusun Peraturan Bupati SPBE
- Memperbarui Surat Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE
- Evaluasi Mandiri SPBE
- Memperbarui SK Tim Koordinasi SPBE
- Koordinasi kebijakan dan tata kelola Sistem Elektronik di OPD
- Pengembangan layanan kinerja pemerintah
- Penjajakan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik
- Draft Kebijakan Tata Naskah Dinas Elektronik
- Menyusun perubahan Arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE pemerintah daerah
- menyusun rencana dan anggaran SPBE

Untuk mewujudkan sasaran1 tersebut didukung melalui 21 (dua puluh satu) program, antara lain :

**Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 1 :**

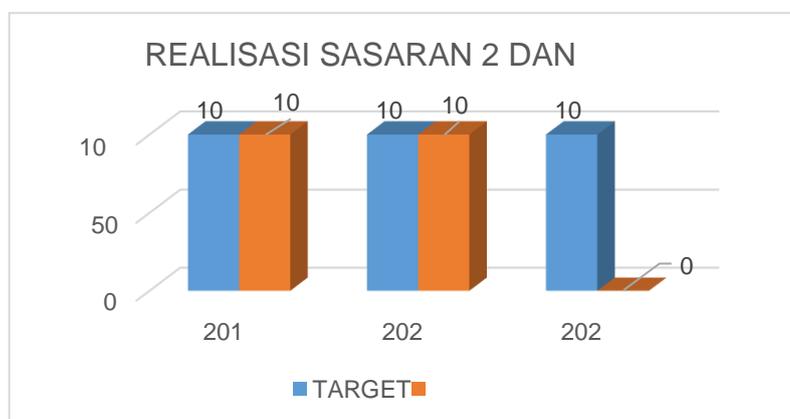
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Persentase PD dengan hasil survei IKM minimal baik	Program Pencatatan Sipil	49.360.000,00	45.540.000,00	92,26	3.820.000,00
		Pemeringkatan E-Government (PeGi)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	544.211.600,00	515.098.700,00	94,65	29.112.900,00
		Indeks SPBE	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	657.509.927,00	640.445.830,00	97,40	17.064.097,00
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	24.868.910,00	23.782.395,00	95,63	17.064.097,00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			Program Penanggulangan Bencana	1.533.877.250,00	1.498.776.076,00	97,71	35.101.174,00
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	114.200.000,00	113.916.000,00	99,75	284.000,00
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.000.000,00	1.009.000,00	33,63	1.991.000,00
			Program Pembinaan Perpustakaan	3.863.002.500,00	3.170.162.896,00	82,06	692.839.604,00
			Program Pengelolaan Arsip	98.254.500,00	98.027.000,00	99,77	227.500,00
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	83.453.500,00	82.673.600,00	99,07	779.900,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	839.571.468.793,00	810.157.340.527,19	96,50	29.414.128.265,81
			Program Kepegawaian Daerah	1.196.500.000,00	1.169.658.120,00	97,76	26.841.880,00
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.282.660.000,00	2.975.233.030,00	90,63	307.426.970,00
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	488.487.850,00	477.933.150,00	97,84	10.554.700,00
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	800.586.360,00	622.026.250,00	77,70	178.560.110,00
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	326.454.000,00	240.556.400,00	73,69	85.897.600,00
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6.022.069.290,00	5.941.172.612,00	98,66	80.896.678,00
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	395.476.755,00	393.214.775,00	99,43	2.261.980,00
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	807.316.820,00	791.413.500,00	98,03	15.903.320,00
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	752.850.000,00	716.965.813,00	95,23	35.884.187,00
			Program Aplikasi Informatika	1.260.266.000,00	1.259.273.000,00	99,92	993.000,00
				861.875.874.055,00	830.934.218.674,19	96,41	30.941.655.380,81

2. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 2 **“Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas Kinerja Dan Pengelolaan Keuangan Daerah”** dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Capaian Indikator **“Opini BPK”** pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 100%. Target **“Opini BPK”** di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk tahun 2021 adalah WTP namun sekarang masih dalam proses pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 2 Indikator 1 termasuk kategori **“Sangat baik”** (100%).

**Tabel Capaian Sasaran 2 Indikator Kinerja 1**

No	Indikator	Realisasi RPJMD		Kinerja 2021	
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini BPK	WTP	WTP	-	-



Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan program:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD yang tersusun
- Jumlah draft laporan posisi kas, saldo kas dan aliran kas  
Jumlah rekonsiliasi pajak dan IWP Dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah yang terfasilitasi
- Persentase OPD yang terfasilitasi aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- Jumlah dokumen penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun
- Jumlah draft laporan tribulanan dan laporan semesteran (prognosis)
- Jumlah draf laporan SPJ fungsional OPD

- b. Capaian Indikator **“Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah”** pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 100%. Target **“Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah”** untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah B, namun sampai dengan laporan ini disusun Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 2 Indikator 2 termasuk kategori **“Sangat baik”** (100%).

**Tabel Capaian Sasaran 2 Indikator Kinerja 2**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	B	B	-	-



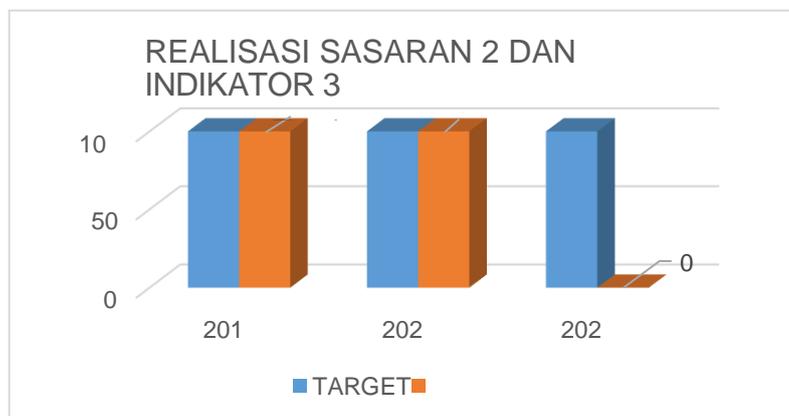
Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penataan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah dokumen kinerja pemerintah daerah yang disusun
- Jumlah unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pendampingan pembangunan ZI/WBK/WBBM
- Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK
- Jumlah PD yang mendapatkan fasilitasi pendampingan Reformasi Birokrasi

- c. Capaian Indikator **“Nilai LPPD”** pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 100%. Target **“Nilai LPPD”** untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah tinggi, namun sampai saat ini nilai LPPD untuk Kabupaten Pacitan Tahun 2021 belum keluar dari Kementerian Dalam Negeri. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas 2 (dua) tahun terakhir maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 2 Indikator 3 termasuk kategori **“Sangat baik”** (100%).

**Tabel Capaian Sasaran 2 Indikator Kinerja 3**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (20)	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	-	-



Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun dan tepat waktu
- % kecamatan yang mendapatkan pembinaan

Untuk mewujudkan sasaran 2 tersebut didukung melalui 12 (dua belas) program, antara lain :

**Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 2 :**

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIA N (%)	EFISIENSI
2	Meningkatn ya transparansi , akuntabilita s kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	72.204.000,00	48.695.341,0 0	67,44	23.508.659,00

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIA N (%)	EFISIENSI
		Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3.554.930.000,00	3.533.877.800,00	99,41	21.052.200,00
		Nilai LPPD	Program Penatagunaan Tanah	560.916.000,00	288.475.120,00	51,43	272.440.880,00
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	8.932.895.000,00	8.012.748.433,00	89,70	920.146.567,00
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	8.713.980.510,00	1.431.331.800,00	16,43	7.282.648.710,00
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	12.568.655.888,00	12.093.955.524,00	96,22	474.700.364,00
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.335.067.540,00	1.160.018.332,00	86,89	175.049.208,00
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.479.279.750,00	1.460.094.600,00	98,70	19.185.150,00
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	308.314.712.201,00	305.747.047.958,20	99,17	2.567.664.242,80
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.570.984.686,00	3.380.127.248,00	94,66	190.857.438,00
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	877.322.761,00	862.021.515,00	98,26	15.301.246,00
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.314.153.000,00	2.164.990.400,00	93,55	149.162.600,00
				352.295.101.336,00	340.183.384.071,20	96,56	12.111.717.264,80

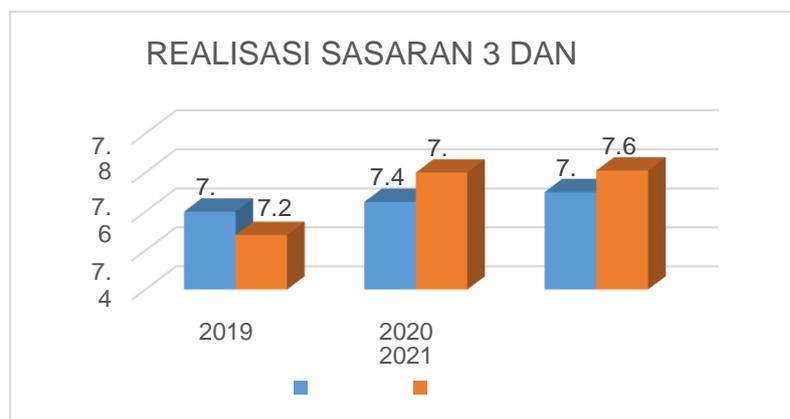
**MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT**

**TUJUAN II : MENINGKATNYA PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 3 **“Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan”** dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Capaian Indikator **“Rata Rata Lama Sekolah”** pada tahun 2019 mencapai 98,38% dan tahun 2020 mencapai 102,01%. Target **“Rata Rata Lama Sekolah”** untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 7,5 dan terealisasi sebesar 7,61 dengan capaian sebesar 101,47%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 3 Indikator 1 termasuk kategori **“Sangat baik”** (101,47%).

**Tabel Capaian Sasaran 3 Indikator Kinerja 1:**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata Rata Lama Sekolah	7.6	7.5	7.61	101.47

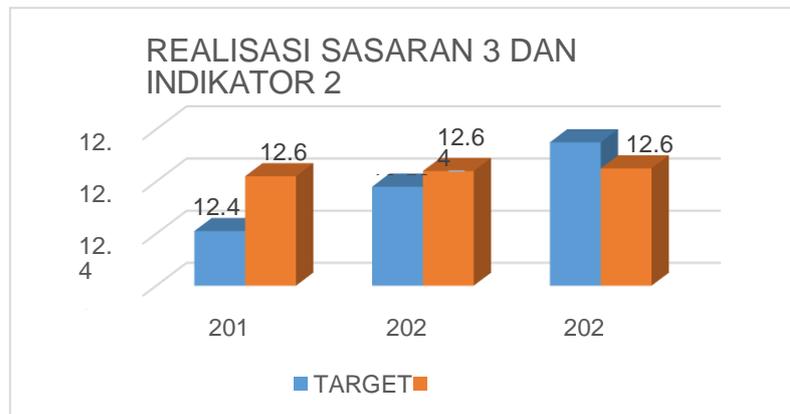


Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan program Pendidikan Non Formal dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Kejar Paket A, B, dan C
  - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
  - Bantuan perlengkapan siswa Pendidikan Non Formal
- b. Capaian Indikator “**Harapan Lama Sekolah**” pada 2019 mencapai 101,69%. dan 2020 mencapai 100,48%. Target “**Harapan Lama Sekolah**” untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 12,75% dan terealisasi sebesar 12,65% dengan capaian sebesar 99,29%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 3 Indikator 2 termasuk kategori “Baik” (99,29%).

**Tabel Capaian Sasaran 3 Indikator Kinerja 2:**

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2020)	Kinerja 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Harapan Lama Sekolah	12.64	12.75	12.65	99,29



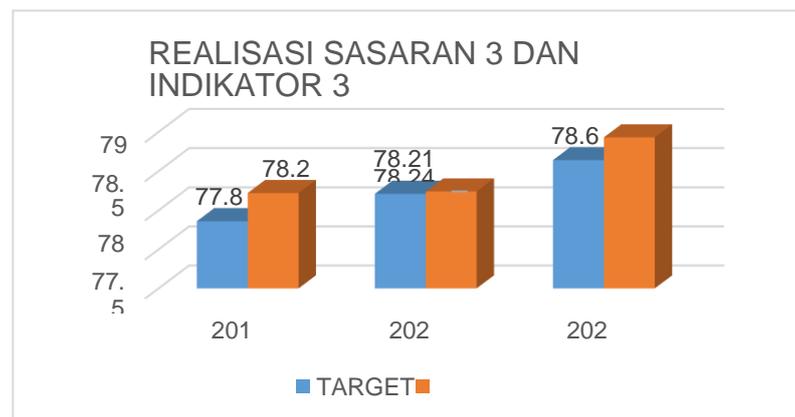
Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
- Bantuan Operasional Sekolah
- Bantuan untuk siswa yang tidak mampu

- c. Capaian Indikator **“Nilai rata rata ujian SD”** pada tahun 2019 mencapai 100,46% dan tahun 2020 mencapai 100,04%. Target **“Nilai rata rata ujian SD”** untuk tahun 2021 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 78,64% dan terrealisasi sebesar 78,93% dengan capaian sebesar 100,37%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 3 Indikator 3 termasuk kategori **“Sangat baik”** (100,4%).

**Tabel Capaian Sasaran 3 Indikator Kinerja 3 :**

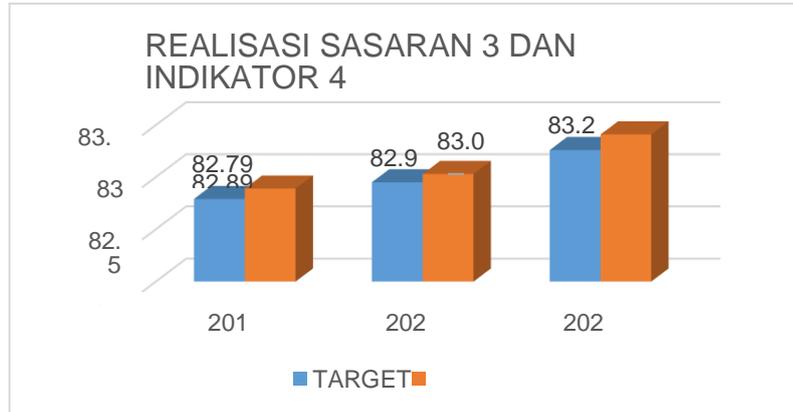
No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2020)	Kinerja 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai rata rata ujian SD	78,24	78,64	78.93	100.37



- d. Capaian Indikator **“Nilai rata rata ujian SMP”** pada tahun 2019 mencapai 100,12% dan 2020 mencapai 100,10%. Target **“Nilai rata rata ujian SMP”** untuk tahun 2021 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 83,26% dan terrealisasi sebesar 83,41% dengan capaian sebesar 100,18%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 3 Indikator 4 termasuk kategori **“Sangat baik”** (100,18%).

Tabel Capaian Sasaran 3 Indikator Kinerja 4 :

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2020)	Kinerja 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai rata rata ujian SMP	83,03	83,26	83,41	100,18



Untuk mewujudkan sasaran 3 tersebut didukung melalui 5 (lima) program, antara lain :

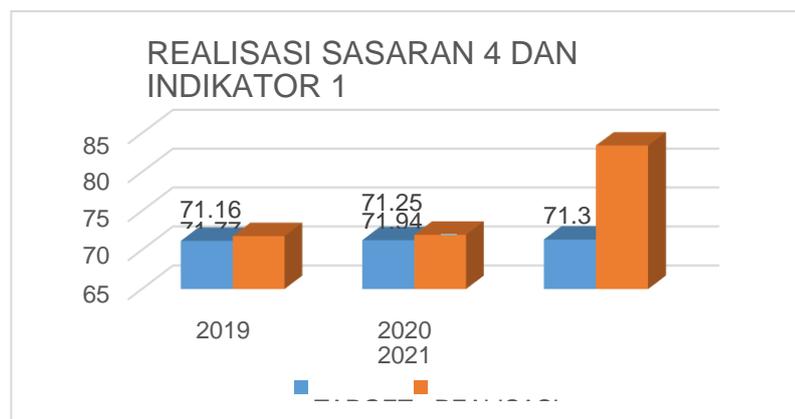
Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 3

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIA N (%)	EFISIENSI
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Rata Rata Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	129.796.519.955,00	122.267.485.177,00	94,20	7.529.034.778,00
		Harapan Lama Sekolah	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	8.360.186.667,00	8.279.066.700,00	99,03	81.119.967,00
		Nilai Rata Rata Ujian	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	499.027.471,00	492.060.150,00	98,60	6.967.321,00
		- SD	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.015.000.000,00	947.230.606,25	93,32	67.769.393,75
		- SMP	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	-
					139.970.734.093,00	132.285.842.633,25	94,51

2. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 4 **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Capaian Indikator **“Angka Harapan Hidup”** pada tahun 2019 mencapai 100,86% dan 2020 mencapai 100,86%. Target **“Angka Harapan Hidup”** untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 71,33% dan terealisasi sebesar 72,07 % dengan capaian sebesar 101,04%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 4 Indikator 1 termasuk kategori **“Sangat baik”** (100,04%).

**Tabel Capaian Sasaran 4 Indikator Kinerja 1 :**

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2020)	Kinerja 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Harapan Hidup	71,94	71,33	72,07	101,04



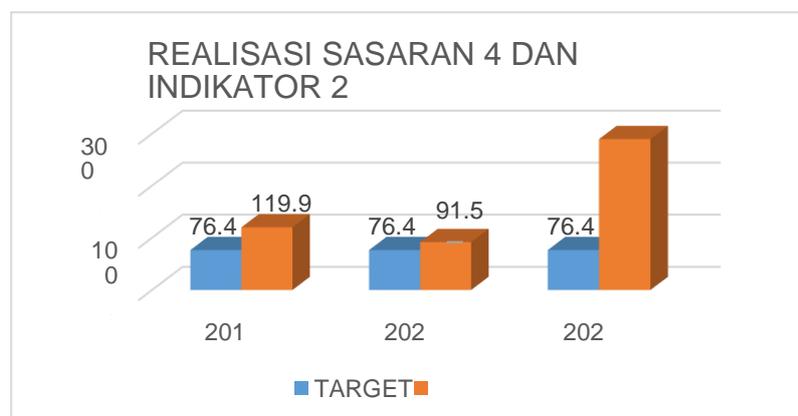
Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar
- Jumlah kunjungan pasien umum (non BPJS)
- Jumlah unit pelayanan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar
- Jumlah sasaran Evaluasi Jaminan Kesehatan (JKN) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

- Jumlah unit pelaksana teknis menyelenggarakan pelayanan JKN
  - Presentase kunjungan peserta BPJS ke FKTP
  - Jumlah unit pelaksana teknis melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
  - Jumlah masyarakat miskin yang mendapat jaminan kesehatan
- b. Capaian Indikator **“Angka Kematian Ibu”** pada tahun 2019 mencapai 63,72% dan 2020 mencapai 91,13%. Target **“Angka Kematian Ibu”** untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 76,42% dan terealisasi sebesar 289,67 % dengan capaian sebesar -179,05 % atau tidak mencapai target RPJMD. Bila dibandingkan tahun 2020, jumlah kematian ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2021 mengalami peningkatan sehingga capaian indikator kinerja ini mengalami penurunan. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 4 Indikator 2 termasuk kategori “Kurang”(-179,05%).

**Tabel Capaian Sasaran 4 Indikator Kinerja 2 :**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian ibu	91,13	76.42	289,67	-179,05



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Angka Kematian Ibu disebabkan karena :

1. Akses Pelayanan Kesehatan ;
2. Perilaku ;

Masih ada masyarakat yang tidak memeriksakan kehamilan pada tenaga medis saat diketahui terlambat haid atau pada trimester pertama. Selain alasan malu karena kehamilan tidak diinginkan, juga karena keterbatasan pengetahuan dan ekonomi sehingga pengetahuan tentang bahaya kehamilan dan resiko tinggi pada kehamilan masih rendah, minimnya sarana transportasi dari rumah ibu ke sarana pelayanan kesehatan sehingga sering terlambat mendapat pertolongan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kehamilan yang tersembunyi atau tidak terdeteksi, mengalami komplikasi yang mengakibatkan kegawatdaruratan obstetrik dan berujung kematian

3. Determinasi Proksi ;

Yang termasuk dalam penyebab langsung (Proximate Determinant) dari kematian ibu adalah komplikasi yang terjadi saat kehamilan, persalinan dan nifas. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan program Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Ibu Bayi dan Anak dan Program Jampersal dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

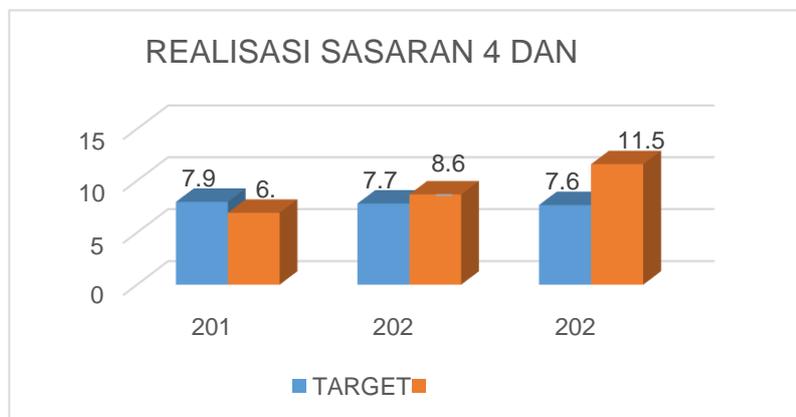
- Jumlah ibu bersalin yang memanfaatkan Jampersal
- Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang tersedia
- Jumlah fasilitator Kelas Ibu
- Jumlah kasus Bumil Gizi Buruk
- Jumlah pembentukan KP ASI

- c. Capaian Indikator “**Angka Kematian Bayi**” pada tahun 2019 mencapai 115,22% dan 2020 mencapai 89,85%. Target “**Angka Kematian Bayi**” untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah

Kabupaten Pacitan adalah 7,64% dan terealisasi sebesar 11,59 % dengan capaian sebesar 48,30% atau tidak mencapai target kinerja RPJMD. Target jumlah kematian bayi tahun 2021 sebanyak 51 bayi, sedangkan realisasi sebanyak 72 bayi sehingga jumlah kematian bayi lebih tinggi dari target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan tingkat kesehatan bayi yang baru lahir. Bila dibandingkan tahun 2020, jumlah kematian bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2021 di Kabupaten Pacitan terjadi peningkatan, sehingga capaian indikator kinerjanya mengalami penurunan. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 4 Indikator 3 termasuk kategori “Kurang” (48,30%).

**Tabel Capaian Sasaran 4 Indikator Kinerja 3 :**

No	Indikator	Realisasi RPJMD Tahun Lalu (2020)	Kinerja 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian bayi	8,67	7,64	11,59	48,30



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Angka Kematian Bayi dikarenakan BBLR (berat bayi lahir rendah) disebabkan antara lain :

- Status gizi ibu bayi sebelum hamil
- Berat badan ibu bayi saat sedang hamil
- Usia Ibu saat sedang hamil
- Jarak waktu melahirkan anak

- Kondisi kesehatan ibu meliputi anemia, riwayat keguguran dan melahirkan BBLR, penyakit infeksi, komplikasi kehamilan dan pregnancy blues
- Melahirkan bayi kembar

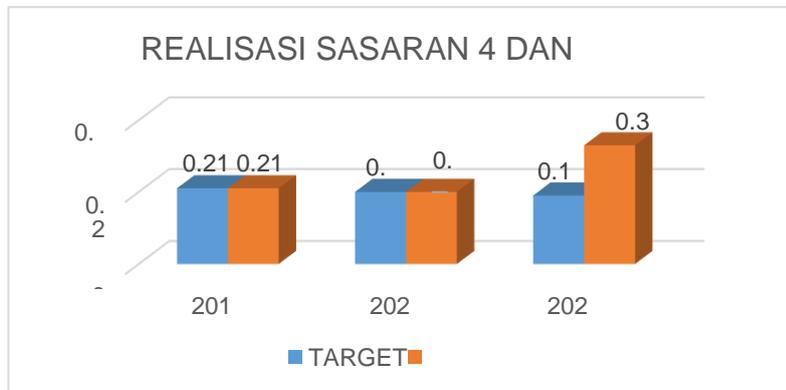
Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Refreshing deteksi dini resiko tinggi di faskes primer
  - Pembinaan wilayah setempat Polindes, Praktek Mandiri Bidan (PMB) dll oleh puskesmas
  - Mendorong standardisasi fasilitas kesehatan sekunder (akreditasi faskes)
  - Sosialisasi Standar Prosedur Operasional Haemoragic Post Partum (SPO HPP) dan Pre-eklamsia (PE) dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Penakib)
  - Penataan sistem rujukan termasuk rujukan dini berencana (RDB) terutama rujukan kasus pre term dan IUGR
  - Intervensi dan akses pelayanan kontrasepsi / penundaan kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS), terutama PUS ALKI ( Anemia, Lingkar Lengan (Lila)< 23,5 cm, penyakit kronis dan bawaan, Inveksi Menular Seksual/IMS) dan 4 terlalu (terlalu muda,terlalu tua,terlalu banyak anak,terlalu dekat jarak kehamilan)
  - Penataan “marketing sistem rujukan yang bermasalah”
- d. Capaian Indikator **“Persentase Balita Gizi Buruk”** pada tahun 2019 mencapai 100% dan 2020 mencapai 100%. Target **“Persentase Balita Gizi Buruk”** untuk tahun 2021 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 0,19% dan terealisasi sebesar 0,33 % dengan capaian sebesar 26,32% atau tidak mencapai target kinerja RPJMD. Target jumlah balita gizi buruk tahun 2021 adalah 51 balita sedangkan capaiannya sebanyak 107 balita. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah balita gizi

buruk dan persentase balita gizi buruk Kabupaten Pacitan tahun 2021 ada peningkatan kasus, sehingga capaian indikator kinerjanya mengalami penurunan. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 4 Indikator 4 termasuk kategori “Kurang” (26,32%).

**Tabel Capaian Sasaran 4 Indikator Kinerja 4 :**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Balita Gizi Buruk	0.2	0.19	0.33	26,32



Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penanganan dan perawatan pada balita gizi buruk antara lain Pemberian Makanan Tambahan (MP-ASI), pengobatan penyakit penyerta, melakukan rujukan keluar daerah, pemantauan perkembangan BB rutin setiap bulan, pengembangan Program Orang Tua Asuh Gizi Buruk, pengembangan Panti Pemulihan Gizi Buruk, Penyuluhan dan KIE, Pemberdayaan masyarakat serta kerjasama sektor terkait dan swasta. Kegiatan Panti Pemulihan Gizi Buruk/CFC (Community Feeding Centre) merupakan pengembangan program gizi inovatif untuk mengatasi masalah gizi buruk balita dengan memanfaatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Diluncurkan pertama kali di Pukesmas Pembantu Ledok Lor Puskesmas Sukorejo. Kegiatan ini telah dikembangkan dan diduplikasi di Puskesmas Gemaharjo pada tahun 2011 dan di Puskesmas Kalak pada tahun

2012. Kegiatan ini perlu diterapkan di seluruh puskesmas Kabupaten Pacitan. Untuk mewujudkan sasaran 4 tersebut didukung melalui 6 (enam) program, antara lain :

**Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 4**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	114.149.599.672,00	86.056.662.234,29	75,39	28.092.937.437,71
		Angka Kematian ibu	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.813.905.808,00	7.156.304.864,00	81,19	1.657.600.944,00
		Angka Kematian bayi	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	247.280.200,00	231.379.450,00	93,57	15.900.750,00
		Persentase Balita Gizi Buruk	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.233.635.425,00	1.938.968.100,00	86,81	294.667.325,00
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	29.502.021.200,00	25.192.571.606,00	85,39	4.309.449.594,00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Rsud	9.242.900.000,00	6.971.400.128,00	75,42	2.271.499.872,00
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	64.713.000,00	64.313.800,00	99,38	399.200,00
				164.254.055.305,00	127.611.600.182,29	77,69	36.642.455.122,71

### Tujuan III : PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 5 “**Menurunnya Angka Kemiskinan**” dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Capaian Indikator “**Angka Kemiskinan**” pada tahun 2019 mencapai 107,90% dan 2020 mencapai 106,21%. Target “**Angka Kemiskinan**” untuk tahun 2021 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 13,85 dan terealisasi sebesar 15,11 % dengan

capaian sebesar 90,90%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 5 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat baik” (90,90%).

**Tabel Target Kinerja Sasaran 5 Indikator 1**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kemiskinan	14,54	13,85	15,11	90,90%



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Angka Kemiskinan disebabkan karena adanya Covid 19 yang memberikan dampak kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Untuk mewujudkan sasaran 5 tersebut didukung melalui 9 (Sembilan) program, antara lain :

**Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 5**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Program Penataan Desa	83.440.000,00	82.501.308,00	98,88	938.692,00
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	50.000.000,00	49.743.500,00	99,49	256.500,00
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.645.682.776,00	2.633.170.732,00	99,53	12.512.044,00
			Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan	835.564.900,00	822.978.389,00	98,49	12.586.511,00

	Masyarakat Hukum Adat				
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.424.403.045,00	7.489.782.441,00	88,91	934.620.604,00
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	14.000.000,00	13.999.750,00	100,00	250,00
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	14.657.800,00	14.622.800,00	99,76	35.000,00
		12.067.748.521,00	11.106.798.920,00	92,04	960.949.601,00

2. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 6 “**Menurunnya Pengangguran**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

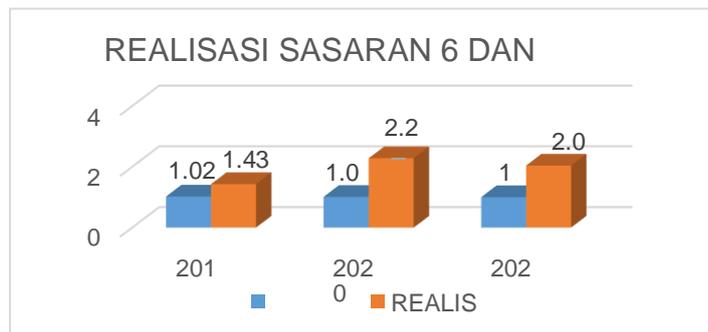
Capaian Indikator “**Tingkat Pengangguran Terbuka**” pada tahun 2019 mencapai 71,33% dan 2020 mencapai -25,74%. Target “**Tingkat Pengangguran Terbuka**” untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 1 dan terealisasi sebesar 2,04 dengan capaian sebesar -4%. Capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka diperoleh dari persentase jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja. Dimana jumlah pengangguran 7.860 dan jumlah angkatan kerja 370.577. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ,dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (DBHCHT).
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT).

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan dari 2.28 % tahun 2020 naik 0,24 % menjadi 2,04 %. Perekonomian yang membaik tecermin dari semakin menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Semakin meningkat pengangguran maka akan semakin tidak produktif penduduknya, sehingga penduduk tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup yang semakin tidak terpenuhi akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 6 Indikator 1 termasuk kategori “kurang” (-4%).

**Tabel Target Kinerja Sasaran 6 Indikator 1**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,28	1	2,04	- 4



Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan:

3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (DBHCHT).
4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan output yang

dihasilkan Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)

Untuk mewujudkan sasaran6 tersebut didukung melalui 3 (empat) program, antara lain :

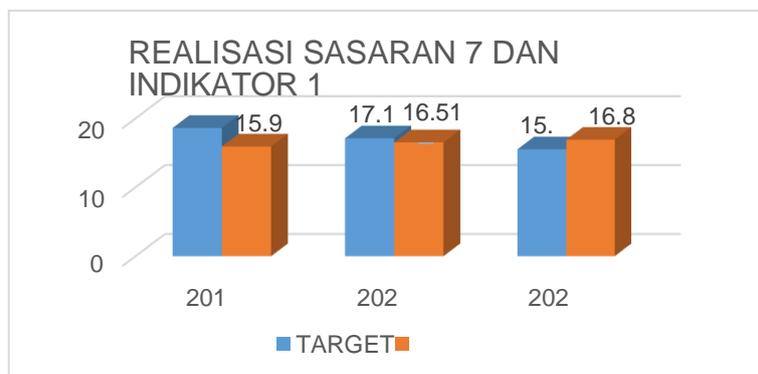
**Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 6**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
6	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.544.243.936,00	2.321.391.492,00	91,24	222.852.444,00
			Program Hubungan Industrial	14.245.800,00	13.915.800,00	97,68	330.000,00
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	87.560.375,00	87.434.880,00	99,86	125.495,00
				2.646.050.111,00	2.422.742.172,00	91,56	223.182.444,00

3. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 7 "**Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**" dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Capaian Indikator "**Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**" pada tahun 2019 mencapai 116,91% dan 2020 mencapai 103,57%. Target "**Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**" untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah 15,5% dan terealisasi 16,89% dengan capaian sebesar 91,03%. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebanyak 0,38% hal ini dikarenakan dampak pandemi covid-19 dimana banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya serta meningkatnya masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 7 Indikator 1 termasuk kategori "sangat baik"(90,03%).

**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 7**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	16,51	15,5	16,89	90,03



Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Penyediaan sarana social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.
- Pemberian bantuan social rastra, rastrada dan bantuan lainnya
- Pemberdayaan dan pelayanan social bagi fakir miskin

Untuk mewujudkan sasaran 7 tersebut didukung melalui 9 (sembilan) program, antara lain :

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 7**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
7	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	223.907.550,00	217.182.800,00	97,00	6.724.750,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.607.788.030,00	2.577.351.348,00	98,83	30.436.682,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	690.497.000,00	689.821.550,00	99,90	675.450,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	125.000.000,00	123.760.795,00	99,01	1.239.205,00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	11.580.400,00	11.574.850,00	99,95	5.550,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	107.013.180,00	106.879.912,00	99,88	133.268,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	15.455.600,00	15.450.600,00	99,97	5.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	38.947.800,00	38.945.150,00	99,99	2.650,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	35.000.000,00	33.573.100,00	95,92	1.426.900,00
				3.855.189.560,00	3.814.540.105,00	98,95	40.649.455,00

**MISI III : MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN  
MENGGERAKKAN POTENSI DAERAH DIDUKUNG  
KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI**

**TUJUAN IV: MENINGKATNYA DAYA SAING EKONOMI DAERAH**

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 8 “**Meningkatnya Kondisi Perekonomian Daerah**” dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Capaian Indikator “**Laju Pertumbuhan Ekonomi**” pada tahun 2019 mencapai 89,28% dan 2020 mencapai 31,83%. Target “**Laju Pertumbuhan Ekonomi**” untuk tahun 2021 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 5,82% dan dapat terealisasi sebesar 2,49% dengan capaian sebesar -42,78%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 8 Indikator 1 termasuk kategori “cukup”(42,78%).

**Tabel Target Kinerja Sasaran 8 Indikator 1**

No	Indikator	Realisasi RPJMD		Kinerja 2021	
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,84	5.82	2,49	42,78

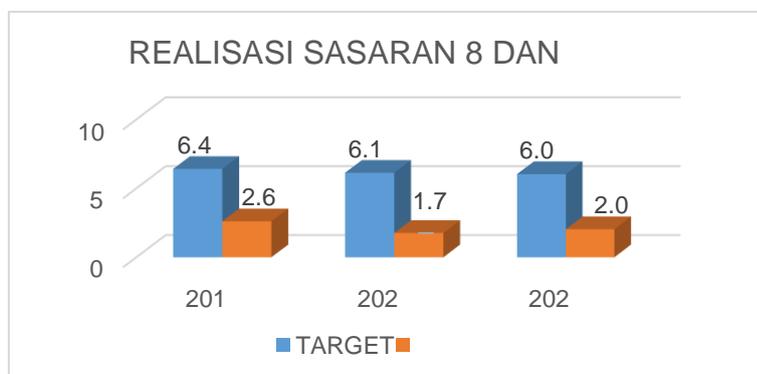


Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi disebabkan karena adanya Covid 19. Memberikan dampak ekonomi dan menyebabkan resesi global yang berefek kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sehingga mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung minus.

- b. Capaian Indikator “**Tingkat Inflasi**” pada tahun 2019 mencapai 245,59% dan 2020 mencapai 348,30%. Target “**Tingkat Inflasi**” untuk tahun 2021 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 6,03% dan terealisasi sebesar 2,03% dengan capaian sebesar 166,33%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 8 Indikator 2 termasuk kategori “Sangat Baik” (166,33). Meskipun Tingkat inflasi tahun 2021 naik 0,27 dibandingkan Tahun 2020, namun angka ini belum melebihi target.

**Tabel Target Kinerja Sasaran 8 Indikator 2**

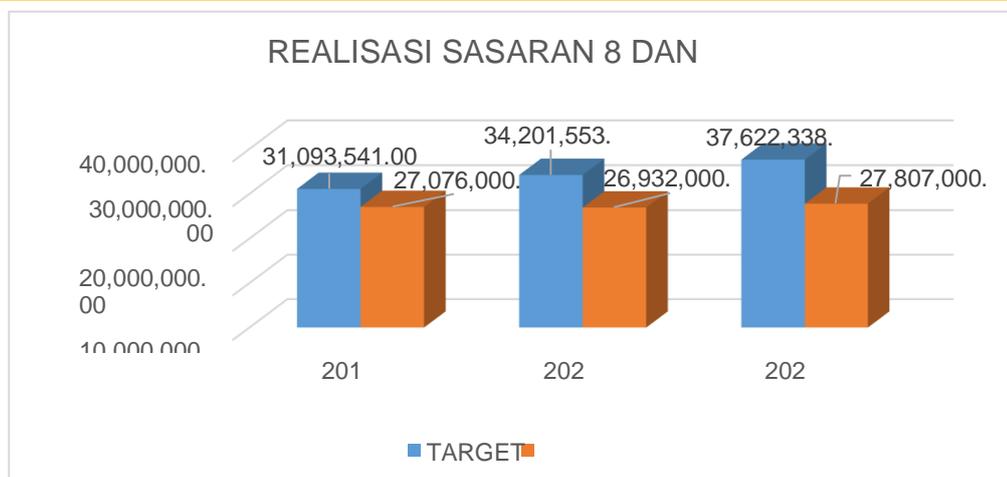
No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Inflasi	1,76	6.03	2,03	166,33



- c. Capaian Indikator “**PDRB Per Kapita**” pada tahun 2019 mencapai 87,08% dan 2020 mencapai 84,10%. Target “**PDRB Per Kapita**” untuk tahun 2021 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 37.622.338,00 dan terrealisasisebesar 27.807.000,00 dengan capaian sebesar 73,91%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 8 Indikator 3 termasuk kategori “Baik” (73,91%).

**Tabel Target Kinerja Sasaran 8 Indikator 3**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	PDRB Per Kapita	26.932.000,00	37.662.338,00	27.807.000	73,91



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator PDRB Perkapita disebabkan karena adanya Covid 19. Memberikan dampak ekonomi dan menyebabkan resesi global yang berefek kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima.

Untuk mewujudkan sasaran 8 tersebut didukung melalui 8 (delapan) program, antara lain :

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 8**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
8	Menguatnya Kondisi Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	25.000.000,00	24.888.250,00	99,55	111.750,00
		Tingkat Inflasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	160.980.000,00	136.974.850,00	85,09	24.005.150,00
		PDRB Per Kapita	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	372.462.000,00	321.490.480,00	86,31	50.971.520,00
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-
			Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	500.000,00	-	0,00	500.000,00
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	34.966.180,00	31.449.100,00	89,94	3.517.080,00
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.769.540.000,00	2.636.200.625,00	95,19	133.339.375,00
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	290.000.000,00	266.021.100,00	91,73	23.978.900,00
			Program Pengembangan Ekspor	100.000.000,00	87.860.500,00	87,86	12.139.500,00
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	441.175.950,00	401.222.954,00	90,94	39.952.996,00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	225.000.000,00	200.995.000,00	89,33	24.005.000,00
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	645.720.000,00	631.524.475,00	97,80	14.195.525,00
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	30.000.000,00	28.895.000,00	96,32	1.105.000,00
				5.135.344.130,00	4.807.522.334,00	93,62	327.821.796,00

2. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 9 “**Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tahun 2021 dilingkup Pemerintah **Mandiri** Capaian Indikator “**Persentase Koperasi**” pada tahun 2019 mencapai 100,55% dan 2020 mencapai 40,54%. Target “**Persentase Koperasi Mandiri**” untuk Kabupaten Pacitan adalah 2,42% dan terealisasi sebesar 1,16% dengan capaian sebesar 47,93%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 9 Indikator 1 termasuk kategori “Cukup”(47,93%).

**Tabel Kinerja Sasaran 9 Indikator 1 :**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2019)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Koperasi Mandiri	0,9	2.42	1,16	47,93

### REALISASI SASARAN 9 DAN INDIKATOR 1

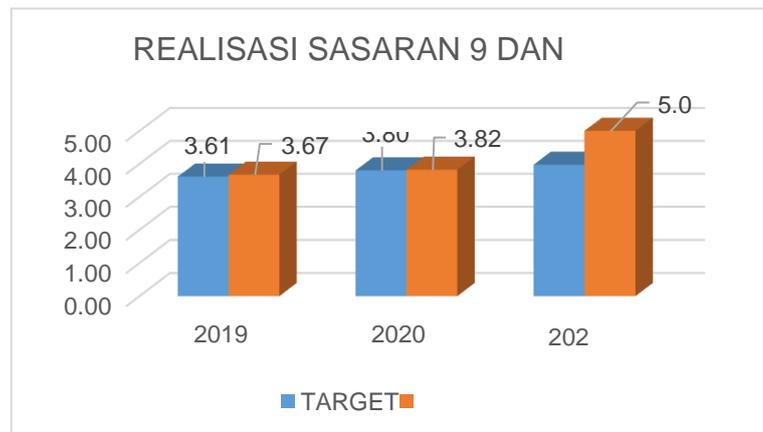


Indikator Kinerja Persentase koperasi mandiri pada tahun 2021 sebesar 1.16% atau mencapai 47.93 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021. Dicapai melalui persentase jumlah koperasi yg dinilai tahun bersangkutan dibagi jumlah seluruh koperasi. Dimana penilaian koperasi tahun terakhir ada 6 koperasi dan jumlah seluruh koperasi 518. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output adalah Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

- b. Capaian Indikator“ **Persentase Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru**”pada tahun 2019 mencapai 101,66% dan 2020 mencapai 100,53%. Target “ **Persentase Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru**”untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 3,97% dan terealisasi sebesar 5% dengan capaian sebesar 125,94%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 9 Indikator 2 termasuk kategori “Sangat Baik” (125,94%).

**Tabel Kinerja Sasaran 9 Indikator 2 :**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru	3.82	3,97	5	125,94



Indikator Kinerja Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru pada tahun 2021 sebesar 5 % atau mencapai 125.94 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 . Dicapai melalui persentase jumlah wirausaha baru tahun bersangkutan dibagi jumlah seluruh UMKM. Dimana jumlah UM yang dibina tahun bersangkutan 1250 dan jumlah seluruh UMKM 25000. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan : Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan output Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pendampingan usaha; Jumlah bantuan alat pengering biofarmaka; Jumlah dokumen FS DED Revitalisasi PLUT. Capaian kinerja tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu dari 3,82 % naik 1.18 menjadi 3.82%. Untuk mewujudkan sasaran 9 tersebut didukung melalui 3 (tiga) program, antara lain :

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 9**

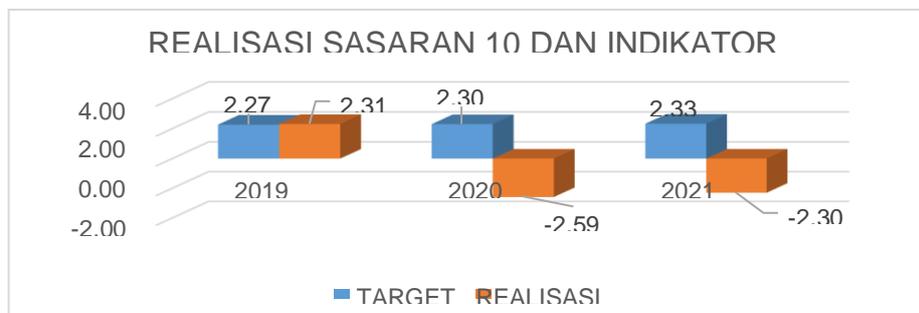
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
9	Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi	Persentase Koperasi Mandiri	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	15.000.000,00	13.724.600,00	91,50	1.275.400,00
		Persentase Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	528.058.000,00	527.557.850,00	99,91	500.150,00
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	155.000.000,00	154.989.950,00	99,99	10.050,00
				698.058.000,00	696.272.400,00	99,74	1.785.600,00

3. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 10 “**Meningkatnya Kinerja Sektor Industri**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator “**Persentase Pertumbuhan Industri**” pada tahun 2019 mencapai 101,76% dan 2020 mencapai -122,61%. Target “**Persentase Pertumbuhan Industri**” untuk tahun 2021 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 2,33% dan terealisasi sebesar -2,3% dengan capaian sebesar -98,71%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 10 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat Kurang” (-9,8%).

**Tabel Kinerja Sasaran 10**

No	Indikator	Realisasi RPJMD		Kinerja 2021	
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pertumbuhan Industri	-2.59	2.33	-2.3	-98,71



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Persentase Pertumbuhan Industri disebabkan oleh :

- Dampak covid 19 bagi IKM membuat pasar terpuruk sehingga omzet turun bahkan ada IKM yang tutup sementara dan beralih ke usaha lainnya.
- Belum tersedianya kawasan industri di Kabupaten Pacitan sehingga menyulitkan investor industri yang akan berinventasi di Kab.Pacitan
- Belum menegtuahinya penerapan sistem perijinan terintegrasi secara elektronik khususnya SIINAS bagi sebagian besar pelaku industri formal

Atas permasalahan yang dihadapi, solusi yang akan dilakukan adalah :

- Menggalakkan pemasaran online dan membangun kemitraan dengan instansi dan lembaga untuk membantu pemasaran produk IKM
- Mengusulkan kawasan peruntukan industri di RTRW Kabupaten Pacitan 2022 – 2042
- Sosialisasi dan pendampingan bagi para pelaku IKM formal dalam penerapan SIINAS

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan program/ kegiatan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Pendataan Industri Kecil Menengah
- Pembinaan Industri Kecil Menengah
- Pameran Produk unggulan

Untuk mewujudkan sasaran 10 tersebut didukung melalui 1 (satu) program, antara lain :

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 10**

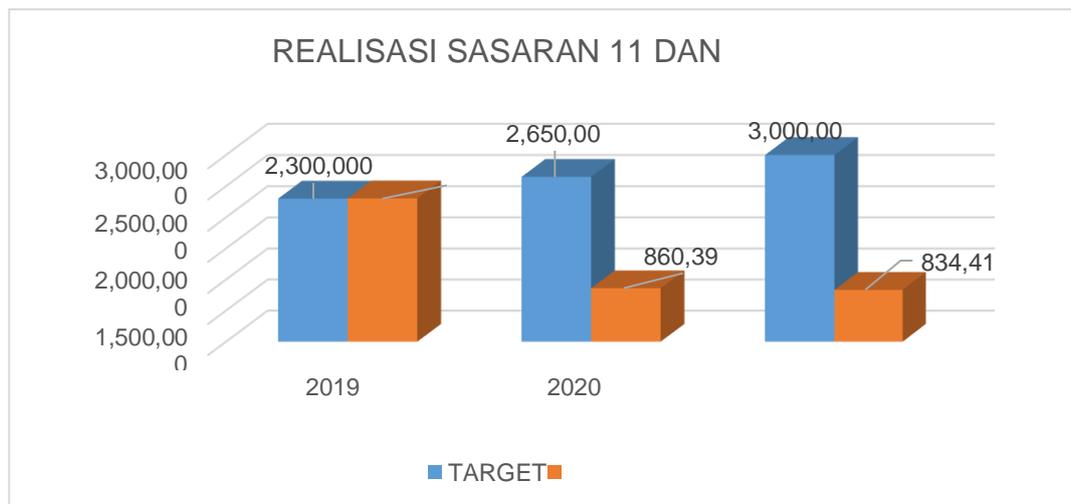
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
10	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	615.990.000,00	615.647.800,00	99,94	342.200,00
				615.990.000,00	615.647.800,00	99,94	342.200,00

4. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 11 “**Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator “**Jumlah Kunjungan Wisata**” pada tahun 2019 mencapai 100,29% dan 2020 mencapai 32,47%. Target “**Jumlah Kunjungan Wisata**” untuk tahun 2021 dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 3.000.000 dan terealisasi sebesar 834.419 dengan capaian sebesar 27,81%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 11 Indikator 1 termasuk kategori “Kurang”(27,81%).

**Tabel Kinerja Sasaran 11**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	860.397	3.000.000	834.419	27,81



Tidak tercapainya kinerja dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisata disebabkan oleh :

- Dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 atau corona virus yang melanda tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Hal ini tentunya melemahkan sistem perekonomian dari berbagai sektor
- Kurangnya SDM Pariwisata yang bersertifikasi
- Sarana Prasarana Pengembangan Fasilitas Destinasi Masih belum optimal
- Masih kurangnya kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan Promosi Pariwisata
- Masih kurang minatnya masyarakat dalam pembentukan desa wisata

Atas permasalahan yang dihadapi, solusi yang akan dilakukan adalah :

- Berharap pandemi covid 19 segera berakhir dan mempersiapkan daerah tujuan wisata dengan lulus sertifikasi protokol kesehatan
- Usulan sertifikasi bagi SDM Pelaku pariwisata melalui pelatihan Provinsi maupun pusat

- Penganggaran lebih di Fokuskan pada Pengembangan Fasilitas Destinasi Pariwisata
- Perlu adanya kerjasama dengan pelaku pariwisata dalam mempromosikan wisata daerah baik dalam maupun luar negeri
- Perlu dukungan dari semua pihak dalam menumbuhkan desa wisata.

Untuk mewujudkan sasaran 11 tersebut didukung melalui 7 (empat) program, antara lain :

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 11**

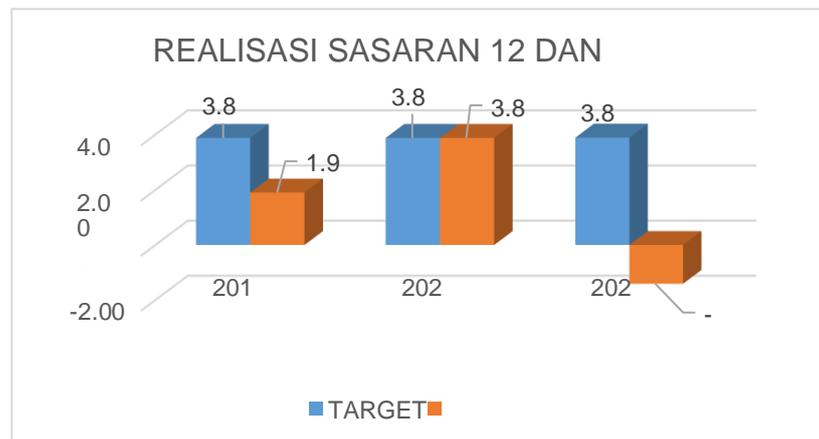
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
11	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata Daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Program Pengembangan Kebudayaan	437.100.000,00	420.131.085,00	96,12	16.968.915,00
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	129.050.000,00	123.686.380,00	95,84	5.363.620,00
			Program Pembinaan Sejarah	1.201.609.500,00	1.151.116.850,00	95,80	50.492.650,00
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	150.000.000,00	148.257.000,00	98,84	1.743.000,00
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	615.968.172,00	551.157.430,00	89,48	64.810.742,00
			Program Pemasaran Pariwisata	430.000.000,00	414.286.466,00	96,35	15.713.534,00
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.377.182.550,00	2.155.282.629,00	90,67	221.899.921,00
						<b>5.340.910.222,00</b>	<b>4.963.917.840,00</b>

5. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 12 “**Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator“ **Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Perikanan**”pada tahun 2019 mencapai 48,97% dan 2020 mencapai 100%. Target “**Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Perikanan**”untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 3,89% dan terealisasi sebesar -1,41% dengan capaian sebesar -36,25%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 12 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat kurang” (-36,25%). Pertumbuhan ekonomi negatif menggambarkan perekonomian masyarakat mulai mengalami kesulitan hal ini disebabkan gejolak ekonomi global dan mekanisme pasar dimana pada masa pandemic covid-19 semua sector terdampak dan mengalami penurunan.

**Tabel Kinerja Sasaran 12**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Perikanan	3,88	3,89	-1,41	-36,25



Untuk mewujudkan sasaran 12 tersebut didukung melalui 9 (sepuluh) program, antara lain :

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 12**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
12	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.079.946.900,00	2.065.606.700,00	99,31	14.340.200,00
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	805.110.010,00	803.206.850,00	99,76	1.903.160,00
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	589.080.140,00	585.663.845,00	99,42	3.416.295,00
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.713.280.590,00	4.883.683.585,00	85,48	829.597.005,00
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.693.523.780,00	7.448.725.750,00	96,82	244.798.030,00
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	140.000.000,00	120.691.300,00	86,21	19.308.700,00
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	343.500.000,00	282.672.950,00	82,29	60.827.050,00
			Program Penyuluhan Pertanian	511.125.000,00	390.431.000,00	76,39	120.694.000,00
						17.875.566.420,00	16.580.681.980,00

#### TUJUAN V : MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

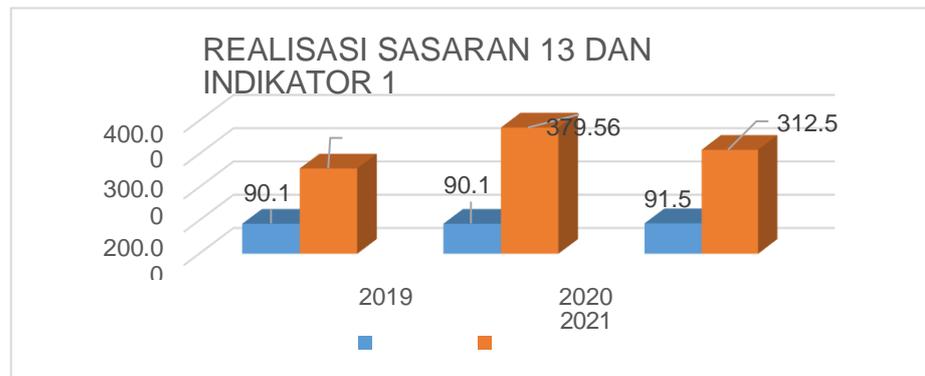
1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 12 “**Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan**” dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Capaian Indikator “**Tingkat Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (%)**” pada tahun 2019 mencapai 272,82% dan 2020 mencapai 420,84%. Target “**Persentase Pertumbuhan PDRB**

**Sub Sektor Pertanian dan Perikanan”** untuk tahun 2021 di

lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 91,50% dan terealisasi sebesar 312,5% dengan capaian sebesar 341,52%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 13 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat Baik” (341,52%).

**Tabel Kinerja Sasaran 13 Indikator 1**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (%)	379,56	91,50	312,5	341,52



Ketersediaan pangan bagi penduduk digambarkan dari ketersediaan energi dan protein. Ketersediaan energi sebesar 7.104 kkal/kapita/hari untuk kalori atau 322,92% dari standar ketersediaan protein sebesar 53,7 gram/kapita/hari dengan rata-rata 312,5%. Ketersediaan energi dan protein telah melebihi angka rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII Tahun 2004 sebesar 2.200 kkal/kapita/hari untuk energi dan 53 gram/kapita/hari untuk protein.

Capaian Kinerja tahun 2021 ini di dukung dengan kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten /kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Kegiatan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan sasaran 13 tersebut didukung melalui 4 (empat) program, antara lain :

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 13**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
13	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (%)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	152.996.800,00	146.077.738,32	95,48	6.919.061,68
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.148.576.240,00	1.107.674.500,00	96,44	40.901.740,00
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	17.387.600,00	17.172.000,00	98,76	215.600,00
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	97.935.030,00	95.808.150,00	97,83	2.126.880,00
				1.416.895.670,00	1.366.732.388,32	96,46	50.163.281,68

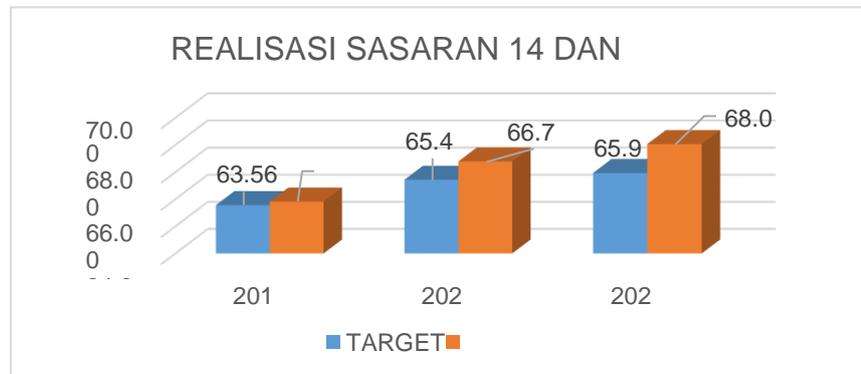
**TUJUAN VI : MENINGKATKAN CAKUPAN DAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG AKTIFITAS PEMBANGUNAN SECARA BERKELANJUTAN**

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 14 “**Meningkatnya Layanan Infrastuktur Dasar Yang Menjangkau Seluruh Wilayah**” dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Capaian Indikator “**Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap**” pada tahun 2019 mencapai 100,41% dan 2020 mencapai 102,06%. Target “**Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap**” untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 65,93% dan terealisasi sebesar 68,06% dengan capaian sebesar 103,23%. Capaian Kinerja Tahun 2021 mengalami

kenaikan sebesar 1,28% dibandingkan capaian Tahun 2020 (66,78%). Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 14 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat Baik” (103,23%).

**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 14 Indikator 1**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	66,78	65,93	68,06	103,23

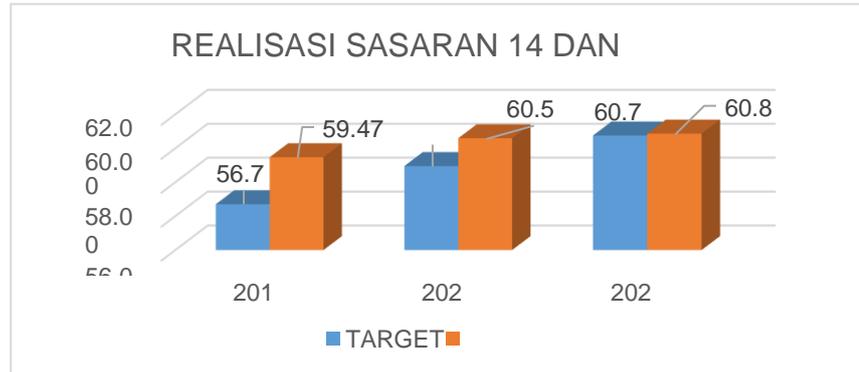


Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan program Penyelenggaraan Jalan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang 543.118,8 m sedangkan Panjang seluruh jalan 798.000 m.

- b. Capaian Indikator “**Persentase Penduduk Berakses Air Bersih**” pada tahun 2019 mencapai 104,89% dan 2020 mencapai 102,78%. Target “**Persentase Penduduk Berakses Air Bersih**” untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 60,75% dan terealisasi sebesar 60,86% dengan capaian sebesar 100,18%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 14 Indikator 2 termasuk kategori “Sangat Baik” (100,18%).

**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 14 Indikator 2**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2019)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	60,59	60,75	60,86	100.18



Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah penduduk terlayani air bersih tahun 2021 sebanyak 362.663 jiwa

Untuk mewujudkan sasaran 14 tersebut didukung melalui 19 (Sembilanbelas) program, antara lain :

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 14**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
14	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dasar Yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	50.690.069.724,00	48.120.972.194,00	94,93	2.569.097.530,00
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.141.145.166,00	3.110.984.714,00	99,04	30.160.452,00
		Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.241.811.073,00	10.653.028.620,00	87,02	1.588.782.453,00

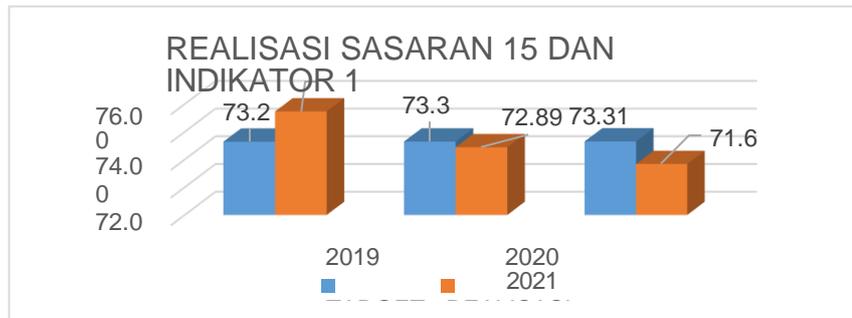
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.684.452.939,00	5.542.547.711,00	82,92	1.141.905.228,00
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.676.045.000,00	3.675.876.400,00	100,00	168.600,00
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.564.281.140,00	1.537.253.700,00	98,27	27.027.440,00
			Program Penataan Bangunan Gedung	3.092.209.490,00	3.042.022.265,00	98,38	50.187.225,00
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	758.476.619,00	681.647.968,00	89,87	76.828.651,00
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	85.000.000,00	83.740.500,00	98,52	1.259.500,00
			Program Penyelenggara an Penataan Ruang	1.091.760.550,00	1.036.220.970,00	94,91	55.539.580,00
			Program Pengembangan Perumahan	338.000.000,00	287.473.025,00	85,05	50.526.975,00
			Program Kawasan Permukiman	1.260.000.000,00	1.236.207.500,00	98,11	23.792.500,00
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.017.000.000,00	2.005.817.700,00	99,45	11.182.300,00
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	40.733.895.153,00	40.371.989.953,00	99,11	361.905.200,00
Jumlah				127.374.146.854,00	121.385.783.220,00	95,30	5.988.363.634,00

2. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 15 “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan**” dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Capaian Indikator “**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**” pada tahun 2019 mencapai 102,97% dan 2020 mencapai

99,44%. Target “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 73,31% dan terealisasi sebesar 71,68% dengan capaian sebesar 97,78%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 15 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat Baik”(97,78%).

**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 15**

No	Indikator	Realisasi RPJMD		Kinerja 2021	
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,89	73.31	71,68	97,78



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pacitan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan penurunan pada indeks kualitas udara, kualitas air dan indeks tutupan hutan. Namun demikian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan masih masuk kategori baik.

Capaian kinerja pada indikator ini didukung dengan kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota dengan output :

- jumlah / indeks kualitas air
- jumlah / indeks tutupan lahan
- Jumlah / indeks kualitas udara

Untuk mewujudkan sasaran 15 tersebut didukung melalui 9 (sembilan) program, antara lain :

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 15**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	202.303.000,00	164.275.500,00	81,20	38.027.500,00
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	166.978.890,00	154.705.400,00	92,65	12.273.490,00
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	696.978.867,00	644.257.560,00	92,44	52.721.307,00
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	16.765.000,00	13.980.900,00	83,39	2.784.100,00
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	80.038.100,00	78.814.000,00	98,47	1.224.100,00
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	38.677.000,00	35.589.000,00	92,02	3.088.000,00
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	46.000.000,00	44.923.320,00	97,66	1.076.680,00
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12.110.000,00	11.882.050,00	98,12	227.950,00
			Program Pengelolaan Persampahan	3.420.365.900,00	3.273.465.570,00	95,71	146.900.330,00
						4.680.216.757,00	4.421.893.300,00

**MISI IV : MENINGKATKAN KESALEHAN SOSIAL DAN HARMONISASI  
ANTAR SELURUH LAPISAN MASYARAKAT**

**TUJUAN IV: MENINGKATKAN KUALITAS DAN KERUKUNAN  
KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERMASYARAKAT**

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada sasaran 16 “**Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator “**Jumlah Konflik Bermanusiaan SARA**” pada tahun 2019 mencapai 100% dan 2020 mencapai 100%. Indikator “**Jumlah Konflik Bermanusiaan SARA**” untuk tahun 2021 dirubah indikator menjadi “**Potensi Konflik Sosial Yang Dapat Dicegah**” di kabupaten dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 16 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat Baik” (100%).

**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 16 Indikator 1**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2021		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Konflik Bermanusiaan SARA	0	100	100	100

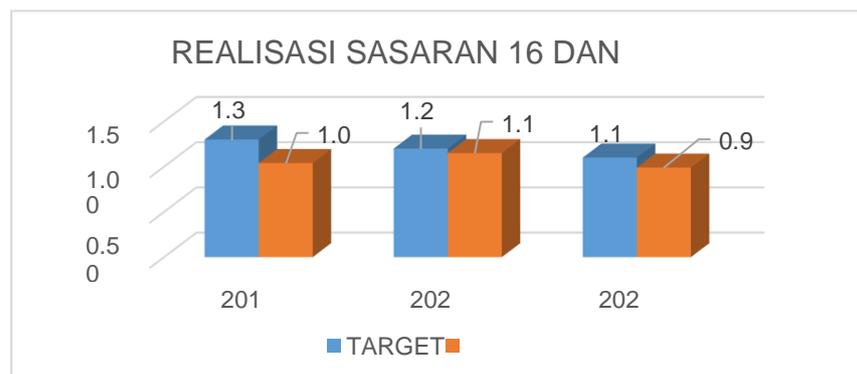


Capaian kinerja tahun 2021 didukung oleh Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Indikator Persentase Penduduk yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan. Untuk tahun 2021 dengan target 13,63 %.Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah laporan rakor tim terpadu penanganan konflik sosial, dengan target 12 bulan dan bisa tercapai 100 % dari target,
  - Jumlah jaringan Tim kewaspadaan dini di Wilayah sebanyak 12 bulan dan bisa terlaksana sesuai target
  - Jumlah laporan dan Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing di Kabupaten Pacitan, sebanyak 12 bulan dan bisa terlaksana sesuai target.
- b. Capaian Indikator **“Angka Kriminalitas”** pada tahun 2019 mencapai 125% dan 2020 mencapai 104,35%. Target **“Angka Kriminalitas”** untuk tahun 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 1,1 dan terealisasi sebesar 0,99 dengan capaian sebesar 111,11%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 16 Indikator 2 termasuk kategori **“Sangat Baik”** (104,35%).

**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 16 Indikator 2**

No	Indikator	Realisasi RPJMD	Kinerja 2020		
		Tahun Lalu (2020)	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kriminalitas	1,15	1,1	0,99	111,11

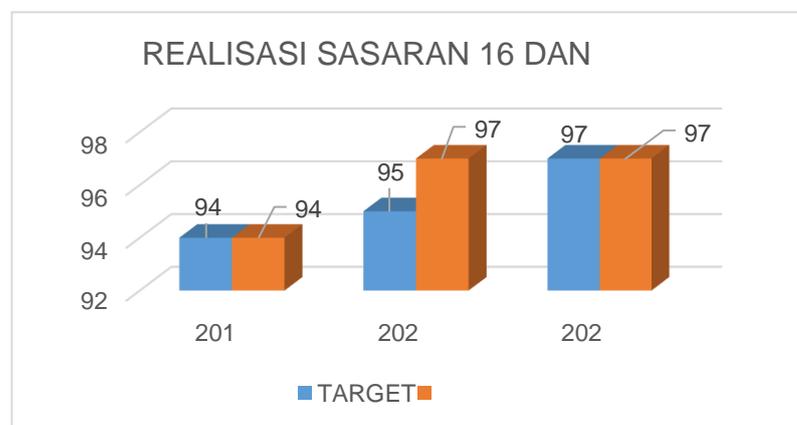


Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan output Persentase pelanggaran dan pengaduan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani.

- c. Capaian Indikator **“Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban”** pada tahun 2018 mencapai 101,08% dan 2019 mencapai 100%. Indikator **“Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban”** diubah menjadi Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Pacitan dengan target 97% dan terealisasi sebesar 97% dengan capaian sebesar 100%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 16 Indikator 3 termasuk kategori **“Sangat Baik”** (100%).

**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 16 Indikator 3**

No	Indikator	Capaian RPJMD	Kinerja 2020		
		Tahun Lalu (2019)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	97	97	97	100



Untuk mewujudkan sasaran 16 tersebut didukung melalui 7 (tujuh) program, antara lain :

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 16**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI
16	Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Konflik Bernuansa SARA	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Satpol PP)	3.273.489.550,00	3.223.639.400,00	98,48	49.850.150,00
		Angka Kriminalitas	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Kec)	1.382.930.235,00	1.374.403.790,00	99,38	8.526.445,00
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	39.264.000,00	33.837.850,00	86,18	5.426.150,00
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	93.395.000,00	93.021.000,00	99,60	374.000,00
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.418.812.355,00	1.418.760.960,00	100,00	51.395,00
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	66.301.740,00	63.644.450,00	95,99	2.657.290,00
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	977.726.500,00	876.406.123,00	89,64	101.320.377,00
					7.251.919.380,00	7.083.713.573,00	97,68



### **BAB III**

#### **CAPAIN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa

untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/ atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah perwujudan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Urusan pemerintahan yang ditugaskan ke Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2021 mencakup Urusan Pilihan yaitu ***Urusan Pertanian.***

Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Kabupaten Pacitan pada Tahun 2021 seluruhnya sebesar Rp. 3.931.255.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.746.346.500,00 atau 95,06 % terdiri dari :

1. Urusan Pilihan sebesar Rp. 3.931.255.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.746.346.500,00 atau 95,06 %.

Adapun Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

### **1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Pacitan adalah Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 23/KPTS/KP. 02/M/ I/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor. 913/782/110.05/2020.

### **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Tugas Pembantuan yang diterima untuk mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 untuk urusan pilihan dengan anggaran Rp. 3.931.255.000,00 dengan realisasi Rp. 3.746.346.500,00, Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

#### **a) Urusan Pilihan**

##### **➤ Urusan Pertanian**

Pelaksanaan tugas pembantuan pada pada urusan pertanian diprioritaskan pada 4 program adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
4. Program Padat Karya Produktif Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian;

### 3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

#### 3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

##### 3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten pacitan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

Target Kinerja Tugas Pembantuan yang diberikan Oleh Pemerintah Pusat

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian</b>		
	Honor Programa	47 OB	Kab. Pacitan
	Honor/ Gaji THL	611 OB	Kab. Pacitan
	BOP	1.092 OB	Kab. Pacitan
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian</b>		
	Bantuan Pemerintah Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA ( Survey dan Investigasi Design Air/ SID)	2 Paket	Kelompok Tani Gemah Ripah 7 Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo
			Kelompok Tani Karya Makmur III Desa Ploso Kecamatan Tegalombo
	Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana dalam Bentuk Uang (Pekerjaan Kontruksi Irigasi Perpipaan)	2 Unit	Kelompok Tani Gemah Ripah 7 Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
			Kelompok Tani Karya Makmur III Desa Ploso Kecamatan Tegalombo
	Operasional / Pendukung Kabupaten	1 Paket	Kabupaten Pacitan
	Operasional/ Pendukung dari Provinsi	1 Paket	Kabupaten Pacitan
<b>3</b>	<b>Perpipaan APBN Pusat TA. 2020</b>		
	Margo Mulyo I	1 unit	Purworejo, Pacitan
	Sumber Urip I	1 unit	Kayen, Pacitan
<b>4</b>	<b>Perpompaan APBN PUSAT TA. 2020</b>		
	Margo Makmur IV	1 unit	Gunungsari, Arjosari
	Sumber Makmur 5	1 unit	Banjarjo, Kebonagung
<b>5</b>	<b>Jalan Usaha Tani</b>		
	Ngudi Rahayu 1	1 unit	Sukorejo, Sudimoro
	Setyo Tani	1 unit	Sukorejo, Sudimoro
	Margo Rukun IV	1 unit	Tanjunglor, Ngadirojo
	Ngupadi Hasil II	1 unit	Tulakan, Tulakan
	Mekar Sari 6	1 unit	Losari, Tulakan
	Mekar Sari 7	1 unit	Losari, Tulakan
	Gemah Ripah 3	1 unit	Wonoanti, Tulakan
	Jati Mulyo 3	1 unit	Jatigunung, Tulakan
	Jati Mulyo 8	1 unit	Jatigunung, Tulakan
	Bumi Harum 13	1 unit	Sidomulyo, Kebonagung
	Sumber Urip IV	1 unit	Kayen, Pacitan
	Mekar Sari	1 unit	Sedeng, Pacitan
	Karya Tani	1 unit	Tambakrejo, Pacitan
	Rukun Makmur IV	1 unit	Gayuhan, Arjosari

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
	Rukun Makmur VI	1 unit	Gayuhan, Arjosari
	Ngudi Mulyo	1 unit	Donorojo, Donorojo
	Sido Mukti	1 unit	Tinatar, Punung
	Nawanggono	1 unit	Nawangan, Nawangan
	Sri Mulyo	1 unit	Jetislor, Nawangan
	Sido Makmur II	1 unit	Tokawi, Nawangan
	Sidorejo	1 unit	Penggun, Nawangan
	Ngudi Rahayu II	1 unit	Ngromo, Nawangan
	Sinar Harapan	1 unit	Pakis Baru, Nawangan
	Nggrening II	1 unit	Bandar, Bandar
	Endah Peni	1 unit	Bangunsari, Bandar
	Suroloyo I	1 unit	Bandar, Bandar
	Sido Maju	1 unit	Bandar, Bandar
	Ngudi Mulyo	1 unit	Bandar, Bandar
	Karya Tani	1 unit	Jeruk, Bandar
	Karya Makmur III	1 unit	Ploso, Tegalombo

### 3.1.2 Realisasi

Realisasi kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dalam matriks berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**  
**Pusat yang Dilaksanakan Oleh daerah**

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN , OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKSI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	( % )	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	( % )	KET
1	Kementerian Pertanian	<p>a) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 23/KPTS/KP. 02/M/I/2020 tanggal 8 Januari 2020;</p> <p>b) SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor. 913/782/110.05/2020;</p> <p>c) DIPA Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur TA. 2020 SP DIPA Nomor 18.08.4.059186/2020 tanggal 12 November 2019;</p> <p>d) SP DIPA-018.03.4.059178/2020 Revisi ke 04 tanggal 19 Juni 2020; e) SP DIPA - 018.08.1.633656/2020;</p>	<p>a. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian;</p>	<p>Kab. Pacitan ;</p>	<p>Dinas Pertanian Kab. Pacitan</p>	<p>1.350.160.000</p>	<p>1.350.160.000</p>	<p>100</p>	<p>47 OB 611 OB 1.092 OB</p>	<p>100</p>	
			<p>b. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</p>	<p>Kelompok Tani Gemah Ripah 7 Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalmbo; Kelompok Tani Karya Makmur III Desa Ploso Kecamatan</p>	<p>Dinas Pertanian Kab. Pacitan</p>	<p>261.000.000,-</p>	<p>261.000.000,-</p>	<p>90,14</p>	<p>2 Paket Survey dan Investigasi Design Air/SID; 2 Unit Pekerjaan Kontruksi Irigasi Perpipaan; 2 Paket Operasional/ Pendukung Kabupaten</p>	<p>100</p>	

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN , OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKSI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	( % )	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	( % )	KET
				atan Tegalo mbo							
c. Program Padat Karya Produktif Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian											
			1 Kegiatan Perpipaan APBN Pusat TA. 2020	Purworejo, Pacitan Kayen, Pacitan	Dinas Pertanian Kab. Pacitan	200.000.000,-	200.000.000,-	100	2 unit perpipaan	100	
			2 Kegiatan Perpompaan APBN PUSAT TA. 2020	Gunung sari, Arjosari Banjarj o, Kebona gung	Dinas Pertanian Kab. Pacitan	260.000.000,-	260.000.000,-	100	2 unit perpompaan	100	
			3 Kegiatan Jalan Usaha Tani APBN PUSAT TA. 2020	Sukorejo, Sudimoro Sukorejo, Sudimoro Tanjunglor, Ngadirojo Tulakan , Tulakan Losari, Tulakan Losari, Tulakan Wonca nti, Tulakan Jatigunung, Tulakan Jatigunung, Tulakan Sidomulyo, Kebonagung Kayen, Pacitan Sedeng , Pacitan	Dinas Pertanian Kab. Pacitan	3.460.000.000,-	3.460.000.000,-	100	30 unit jalan usaha tani	100	

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN , OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKSI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	( % )	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	( % )	KET	
				Tamba krejo, Pacitan Gayuha n, Arjosari Gayuha n, Arjosari Donoroj o, Donoroj o Tinatar, Punung Nawan gan, Nawan gan Jetislor, Nawan gan Tokawi, Nawan gan Pengu ng, Nawan gan Ngromo , Nawan gan Pakis Baru, Nawan gan Bandar, Bandar Bangun sari, Bandar Bandar, Bandar Bandar, Bandar Bandar, Bandar Bandar, Bandar Jeruk, Bandar Ploso, Tegalo mbo								

## 3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

### 3.2.1 Target Kinerja

Target kinerja tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada pemerintah daerah kabupaten pacitan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

Target Kinerja Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
1	<b>Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi</b>		
	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	1 paket	se-kab
2	<b>Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Panga</b>		
	Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat (benih padi inbrida)	1.900 ha	se-kab
	Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat (benih jagung hibrida)	1.350 ha	Kec Donorojo, Punung, Pringkuku, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tulakan, Tegalombo, Sudimoro
	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	1 paket	se-kab

### 3.2.2 Realisasi

Realisasi kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana dalam matriks berikut ini :

**Tabel 3.4**

**Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan  
Provinsi yang Dilaksanakan Oleh daerah**

NO	INSTANSI	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET	
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	a) SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor. 913/782/110.05/2020 ; b) SP DIPA-018.03.4.059178/2020 Revisi ke 04 tanggal 19 Juni 2020	a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan									
			1.	Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Kab. Pacitan ;	Dinas Pertanian Kab. Pacitan	63.400.000,-	2.500.000,-	3,9	perjalanan identifikasi cpcl	3,9	
			2	Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Kec Donorojo, Punung, Pringku, Arjosari, Nawan, Bandar, Tulakan, Tegalmbo, Sudimoro; se kab. Pacitan	Dinas Pertanian Kab. Pacitan	Rp. 20.150.000,-	12.650.000,-	62,8	1.900 ha benih padi inbrida; 1.350 ha benih jagung hibrida; 1 paket Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	100	

**3.3 Permasalahan dan Kendala**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima oleh daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pagu mamim, honor panitia dan narasumber tinggi, perjalanan luar daerah tidak terserap

**3.4 Saran dan Tindak Lanjut**

Solusi yang diusulkan adalah sebagaiberikut :

- a. Yang dicairkan sesuai standar daerah

## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### 2.1 URUSAN PENDIDIKAN

##### 2.1.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat salah satunya adalah pelayanan pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal, disebutkan bahwa SPM bidang pendidikan meliputi :

- a. SPM Pendidikan Anak Usia Dini
- b. SPM Pendidikan Dasar
- c. SPM Pendidikan Kesetaraan

##### 2.1.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Adapun target pencapaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

Target Pencapaian Bidang Pendidikan

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	Nilai (%)	Batas pencapaian
	INDIKATOR		
1	Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	Setiap tahun
2	Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	Setiap tahun
3	Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	Setiap tahun

### 2.1.3 REALISASI SPM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021

Tabel 4.2

Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2021			Capaian SPM 2021		Realisasi Anggaran (Rp.)
		Indikator			Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	2021	85,31	16.835	100	14.531	85,31	11.801.309.301

2	Pendidikan Dasar	Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	2021	96,54	66.990	100	63.708	96,54	91.864.247.010
3	Pendidikan Kesetaraan	Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	2021	68,52	3.510	100	2.405	68,52	3.132.345.590

## 2.1.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi untuk pencapaian SPM pendidikan berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

NO	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	CAPAIAN TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM TAHUN 2021				SUMBER DANA	
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	Batas waktu (Thn)		TARGET RPJMD (%)	REALISASI CAPAIAN (%) SEMESTER II	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	2021	100	85,36	100	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang guru PAUD Dini	DAK FISIK		920.544.855
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	APBD	47.813.200	

							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	APBD	2.574.000,00 0	
							Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	DAK FISIK		582.728.096
							Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAK NON FISIK		10.247.649.1 50
	Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100		95,44	96,54	96,54	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang guru Sekolah Dasar			
							Penambahan Ruang Kelas Baru	APBD	517.377.400	
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	DAK FISIK		13.084.539.0 00
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	APBD	41.400.000	

								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	DAK FISIK		10.875.613.7 40
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DAK NON FISIK		33.701.823.2 48
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	DAK FISIK		8.044.147.30 0
								Penambahan Ruang Kelas Baru	APBD	158.695.250	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	DAK FISIK		9.606.520.09 5
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DAK NON FISIK		15.834.130.9 77
	Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam	100	<b>2021</b>	3,06	68,52	68,52		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetara an	APBD	44.220.550	

	pendidikan kesetaraan									
							Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	APBD	598.360.040	
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan)	APBD	500.000.000	
							Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DAK NON FISIK		1.989.765.000

## 2.1.5 DUKUNGAN PERSONIL

**Tabel 4.4**

Daftar Pegawai Negeri Sipil  
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Instansi	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dinas Pendidikan	93	47	140
2	UPT TKSD + Guru DPK	4	373	377
3	Guru SMP + Staf TU	579	494	1.073
4	Guru SD + Penjaga	1.312	1.149	2.461
<b>JUMLAH</b>		<b>1.988</b>	<b>2.063</b>	<b>4.051</b>
<b>Prosentase</b>		<b>49,07%</b>	<b>50,93%</b>	

**Tabel 4.5**

Daftar Pegawai Negeri Sipil  
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Instansi	I	II	III	IV	Total
1	Dinas Pendidikan	1	38	33	68	140
2	UPT TKSD + Guru DPK	1	33	260	83	377
3	Guru SMP + Staf TU	-	150	503	420	1.073
4	Guru SD + Penjaga	14	273	1.454	720	2.461
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>494</b>	<b>2.250</b>	<b>1.291</b>	<b>4.051</b>
<b>Prosentase</b>		<b>0,39%</b>	<b>12,19%</b>	<b>55,54%</b>	<b>31,87%</b>	

**Tabel 4.6**

Daftar Pegawai Negeri Sipil  
Berdasarkan Eselon

No	Instansi	Eselon									Total
		II		III		IV		V	Staf	Fungsional	
		a	b	a	b	A	B				
1	Dinas Pendidikan	-	1	1	3	13	-	1	58	63	140
2	UPT TKSD + Guru DPK	-	-	-	-	-	-	-	1	376	377
3	Guru SMP + Staf TU	-	-	-	-	-	-	26	156	891	1.073
4	Guru SD + Penjaga	-	-	-	-	-	-	-	206	2.255	2.461
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>421</b>	<b>3.585</b>	<b>4.051</b>
<b>Prosentase</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,67%</b>	<b>10,39%</b>	<b>88,50%</b>	

**Tabel 4.7**

Daftar Pegawai Negeri Sipil  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Instansi	SD	SL TP	SL TA	D1	D2	D3	S1	S2	Total
1	Dinas Pendidikan	0	2	40	1	5	2	77	13	140
2	UPT TKSD + Guru DPK	1	0	39	1	219	2	114	1	377
3	Guru SMP + Staf TU	0	6	159	5	4	17	845	37	1073
4	Guru SD + Penjaga	9	41	243	0	518	22	1.604	24	2461
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	<b>49</b>	<b>481</b>	<b>7</b>	<b>746</b>	<b>43</b>	<b>2.640</b>	<b>75</b>	<b>4.051</b>
<b>Prosentase</b>		<b>0,25%</b>	<b>1,21%</b>	<b>11,87%</b>	<b>0,17%</b>	<b>18,42%</b>	<b>1,06%</b>	<b>65,17%</b>	<b>1,85%</b>	<b>0,25%</b>

## 2.1.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

**Tabel 4.8**

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih belum terbangunnya sistem pendidikan yang baik untuk mendapatkan data base pendidikan (peserta didik tidak mampu (miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah satuan pendidikan, ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi) data sekolah pada jenjang Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Dasar (MI, MTs) yang menjadi kewenangan Kemenag;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solusi permasalahan ke satu adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi membuat Aplikasi Pendataan LI SM (Lembar Individu Sekolah Madrasah) yang diisi secara online oleh satuan pendidikan baik di Satuan Pendidikan Kemenag dan Bidang PAUD;</li> </ul>
2	Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dampak dari inovasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dalam memenuhi amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 belum dapat meningkatkan pencapaian SPM Bidang Pendidikan secara maksimal karena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solusi untuk permasalahan kedua yaitu melaksanakan inovasi SMART BETTER dan Sahabat Dikmas yang sasarannya adalah mendata masyarakat usia 7-59 tahun putus sekolah/tidak sekolah serta menghimpun data siswa anak</li> </ul>
3	Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		

		<p>belum bertanggung secara spesifik dan memadai di Tahun Anggaran 2020.</p>	<p>tidak mampu berdasarkan Lembar Individu Sekolah Madrasah sehingga tersedianya data valid sebagai sasaran SPM Bidang Pendidikan dan juga untuk menyusun Tahun Anggaran 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan kinerja Tim Pencapaian SPM Bidang Pendidikan secara optimal guna mendapatkan data dan capaian kinerja di masing- masing SPM Bidang Pendidikan ( PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan).</li> </ul>
--	--	--	---

## **2.2 URUSAN KESEHATAN**

### **2.2.1. JENIS PELAYANAN DASAR**

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Bab II Menjelaskan ada 12 Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

### 2.2.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Adapun target pencapaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.9**

Target Pencapaian Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	Keterangan
		Indikator	Nilai		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,31%	2021	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,94%	2021	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentasi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,39%	2021	
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard	86,37%	2021	

5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100%	2021	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Presentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	22,29%	2021	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	50,07%	2021	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	19,58%	2021	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	76,73%	2021	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	86,26%	2021	
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Presentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100%	2021	

12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	74,79%	2021	
----	--	---	--------	------	--

### 2.2.3 REALISASI SPM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021

Berikut ini adalah realisasi pencapaian SPM bidang kesehatan pada akhir tahun 2021 :

**Tabel 4.10**  
Realisasi Pencapaian Bidang Kesehatan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standard Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	TARGET SPM 2021			Capaian SPM 2021		Realisasi Anggaran
		Indikator	Nilai		Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,31%	2022	95,31%	6835	95,31%	6153	90.02%	Rp. 527549040,-
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,94%	2022	94,94%	6525	94,94%	5994	91.86%	Rp. 1908963722,-
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,39%	2022	99,39%	6559	99,39%	5676	86.54%	Rp. 203564550,-

4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard	86,37%	2022	86,37%	25657	86,37%	24405	95.12%	Rp. 1027438696,-
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100%	2022	100%	62157	100%	59188	95.22%	Rp. 415700775,-
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Presentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	22,29%	2022	22,29%	334653	22,29%	216085	64.57%	Rp. 1295577544,-
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	50,07%	2022	50,07%	122678	50,07%	84279	68.70%	Rp. 1999932225,-
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	19,58%	2022	19,58%	196653	19,58%	85654	43.56%	Rp. 85745350,-
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	76,73%	2022	76,73%	7320	76,73%	7320	100.00%	Rp. 75270650,-
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	86,26%	2022	86,26%	1126	86,26%	1126	100.00%	Rp. 142717350,-
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Presentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100%	2022	100%	5154	100%	2284	44.32%	Rp. 104655100,-
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan	74,79%	2022	74,79%	15740	74,79%	15740	100.00%	Rp. 56162575,-

		pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2.2.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi untuk pencapaian SPM pendidikan berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.11**

Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2021	Capaian, Target, Rencana Pembiayaan SPM					Sumber Dana			
	Indikator	Target Nasional	Batas Waktu (tahun)		Tahun 2021							APBD	APBN
					Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Pembiayaan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	2022	95,31%	89%	90.02%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 777.001.838	√			

2	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	2022	94,94%	92%	91.86%	MASYARAKAT/P enyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan IbuBersalin	Rp 2.308.535.757	√	
3	Persentasi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	2022	99,38%	93%	86.54%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 295.658.805	√	
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard	100 %	2022	88,63%	85%	95.12%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 500.580.475	√	
5	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100 %	2022	100%	100%	95.22%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 524.858.801		
6	Presentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan	100 %	2022	25,53%	50%	64.57%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Rp 494.773.685	√	

	sesuai standard							pada Usia Produktif			
7	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100 %	2022	64,45%	64%	68.70%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp 632.940.748	√	
8	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100 %	2022	19,58%	50%	43.56%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 104.172.290	√	
9	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100 %	2022	100%	100%	100.00%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Rp 93.392.000	√	
10	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	100 %	2022	100%	100%	100.00%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Rp 124.876.170	√	

								dengan Gangguan Jiwa Berat			
11	Presentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100 %	2022	36,88%	80%	44.32%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 146.310.705	√	
12	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	100 %	2022	74,79%	60%	100.00%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp 76.752.500	√	

### 2.2.5 DUKUNGAN PERSONEL

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Bidang

Kesehatan didukung oleh dukungan personil di 24 Puskesmas, 3 Bidang, 1 Sekretariat dan 2 UPT di Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan

Pendidikan	Bidang Kesehatan	
	L	P
<b>SD/MI</b>	1	1
<b>SLTP/MTS</b>	6	6
<b>SMA/SMK</b>	68	83
<b>D1</b>	2	16
<b>D2</b>	1	0
<b>D3</b>	76	327
<b>S1</b>	58	99
<b>S2</b>	3	1

<b>JUMLAH</b>	<b>215</b>	<b>537</b>
<b>TOTAL</b>	<b>752</b>	

### 2.2.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja SPM Bidang Kesehatan yang sudah ditetapkan pada tahun 2021 ini di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Permasalahan terkait pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.13**

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Solusi</b>
1	2	3	4
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Kurangnya Informasi mengenai pelayanan antenatal, pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas, Ibu hamil mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja Kabupaten/Kota, kendala biaya, sosial budaya	Pendataan ibu hamil untuk K1 murni secara lebih intensif dengan kegiatan sweeping bumil K1 by name by address, peningkatan kapasitas bidan dalam pencatatan dan pelaporan pelayanan KIA di register kohort.

2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Kurangnya informasi mengenai pelayanan persalinan, akses ke fasyankes sulit/jauh, ibu bersalin mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota, kendala biaya, Sosial Budaya	Meningkatkan edukasi dan pemberian informasi ke masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi dan akses jalan dari rumah warga ke pelayanan kesehatan, baik di dalam maupun di luar kabupaten/ kota
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kurangnya informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir, akses ke fasyankes sulit/jauh, pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas, bayi baru lahir mendapatkan pelayanan di Luar wilayah kerja kab/Kota, kendala biaya, Sosial Budaya	Melakukan edukasi ke masyarakat melalui Meningkatkan kunjungan petugas kesehatan ke posyandu, rumah, tempat penitipan anak; melakukan pelayanan kesehatan termasuk imunisasi dasar, deteksi dini tumbuh kembang bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi (konseling).
4	Pelayanan kesehatan balita	Kurangnya informasi mengenai pelayanan balita, akses ke fasyankes sulit, pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas, balita mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja Kab/Kota, kendala biaya, sosial budaya	Memberikan edukasi kepada para orangtua saat pelaksanaan posyandu di wilayah setempat, Meningkatkan komunikasi dengan fasyankes swasta mengenai data terbaru serta berkordinasi secara intens
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Usia Pendidikan Dasar di luar sekolah tidak terskrining	Melakukan skrining rutin melalui stakeholder setempat
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Hambatan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) , sistem	Melakukan manajemen dan perapian data , melakukan inventarisir alat dan mengupayakan peremajaan,

		informasi (pencatatan dan pelaporan SPM) dan regulasi kesehatan, hambatan pada pemberdayaan masyarakat, sediaan alat kesehatan, Sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan dan penganggaran SPM Kesehatan	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Kurangnya informasi mengenai pelayanan kesehatan usia lanjut, sulitnya/jauhnya akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan jejaring Puskesmas ke Puskesmas, adanya usia lanjut yang mendapat pelayanan di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota, terbatasnya biaya, masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang disebabkan salah satunya oleh faktor sosial dan budaya, adanya kematian/mortalitas usia lanjut, perpindahan penduduk/migrasi, ketersediaan sumber daya terbatas	Meningkatkan keaktifan dari kader atau tenaga kesehatan untuk melakukan jemput bola. Pihak Puskesmas diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dalam program posyandu lansia guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia. Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan terutama keaktifan kader posyandu dan dukungan keluarga
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Hambatan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) , sistem informasi (pencatatan dan pelaporan SPM) dan regulasi kesehatan, hambatan pada pemberdayaan masyarakat, sediaan alat kesehatan,	Melakukan perapian data Memperbaiki manajemen informasi data Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam penanganan penderita hipertensi

		pembiayaan dan penganggaran SPM Kesehatan	
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	Hambatan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) , sistem informasi (pencatatan dan pelaporan SPM) dan regulasi kesehatan, hambatan pada pemberdayaan masyarakat, sediaan alat kesehatan, pembiayaan dan penganggaran SPM Kesehatan	Melakukan perapian data Memperbaiki manajemen informasi data Memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya pengobatan bagi penderita DM
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Hambatan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) , sistem informasi (pencatatan dan pelaporan SPM) dan regulasi kesehatan, hambatan pada pemberdayaan masyarakat, sediaan alat kesehatan, Hambatan pada Sumber Daya kesehatan	Melakukan perapian data Memperbaiki manajemen informasi data Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi ODGJ
11	Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberculosis	Penemuan penderita rendah, kepatuhan pengobatan rendah, stigma masih tinggi	Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tuberkolosis yang tidak terobati, dan memberikan informasi kemudahan pengobatan di fasyankes

12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Stigma masih tinggi	Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat perihal minimnya resiko penularan saat bersosialisasi dengan penderita dan memberikan informasi kepada penderita tentang fasilitas yang dapat diperoleh di fasyankes
----	--	---------------------	---

## **2.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM**

### **2.3.1. JENIS PELAYANAN DASAR**

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standart Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat 2 jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

Indikator Pencapaian pelayanan dasar yang diselenggarakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari :
  - Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik :
  - Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

### **2.3.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pacitan sebagaimana table berikut :

**Tabel 4.11**

Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2021
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2021

### 2.3.3 REALISASI SPM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 Tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.12**

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2021			Capaian SPM 2021		Realisasi Anggaran	
		Indikator	Nilai %		Target RPJMD %	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %		
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2021	60,75	358.340	60,75	358.988	60,86	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp.1.091.977.500,00
										Jumlah	Rp. 1.091.977.500,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	2021	95,06	160.104	93,56	160.172	95,10	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rp. 3.675.876.400,00
										Jumlah	Rp. 3.675.876.400,00

### 2.3.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah. Yang berkaitan dengan indikator SPM bidang pekerjaan umum alokasi anggaran sebagai berikut :

**Tabel 4.13**

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar			Capaian Thn 2019 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM				Sumber dana	
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Thn)		Tahun 2021				APB D	APBN
					Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ Kegiatan	Rencana Pembiayaan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2021	59,11	58,95	60,59	<b>Program :</b> PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, <b>Kegiatan :</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.091.977.500,00	V	
2	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	2021	93,56	95,06	95,10	<b>Program :</b> Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah <b>Kegiatan:</b> Penyediaan sarana dan prasarana air limbah	Rp. 26.860.000,00	V	

### 2.3.5 DUKUNGAN PERSONEL

**Tabel 4.14**

Dukungan Personel SPM Bidang Pekerjaan Umum

Pendidikan	Bidang Cipt Karya	
	L	P
SLTA	6	0
S1	3	2
<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	

### 2.3.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM:

**Tabel 4.15**

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi topografi daerah, sebagian besar pegunungan</li> <li>2. Ketersediaan air/sumber air baku terbatas</li> <li>3. Kelembagaan pengelola air minum perdesaan sebagian besar belum optimal</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencari sumber-sumber air baru, embung dan aliran sungai yang mempunyai potensi untuk penyediaan air minum</li> <li>- Meningkatkan konservasi sumber daya air untuk kelestarian sumber air</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat, BUMDES,</li> </ul>

			<p>CSR dalam pembangunan dan pengembangan sarana air bersih</p> <p>- Meningkatkan pembinaan HIPPAM oleh OPD terkait</p>
2	<p>Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi ekonomi masyarakat masih banyak yang tidak mampu</li> <li>2. Sarana dan prasarana air bersih terbatas</li> <li>3. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan bangunan masih kurang</li> </ol>	<p>Meningkatkan sosialisasi dan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan dan pendanaan</p>

## **2.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

### **2.2.1. JENIS PELAYANAN DASAR**

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat ada 2 Jenis Layanan Dasar yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

### **2.3.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pacitan sebagaimana table berikut :

**Tabel 4.16**

## Target Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2021
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2021

### 2.2.3 REALISASI SPM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.17**

Realisasi Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	TARGET SPM 2021			Capaian SPM 2021		Realisasi Anggaran	
		Indikator			Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	100 %	2021	100	2 unit	100%	2 unit	100%	Dana Bansos	Rp35.000.000
										Dana Operasional	Rp15.000.000
										Jumlah	Rp50.000.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	100 %	2021	100	0 unit	100 %	0 unit	100%	Dana Bansos	-
										Dana Operasional	-
										Jumlah	-

### 2.3.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah. Yang berkaitan dengan indikator SPM bidang pekerjaan umum alokasi anggaran sebagai berikut :

**Tabel 4.18**

Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar			Capaian Thn 2021 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM				Sumber dana	
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Thn)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%)	Program/Kegiatan	Rencana Pembiayaan	Tahun 2021	
									APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	100	2021	75,36%	100%	100%	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	0		
							Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00	√	
							Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	158.000.000,00	√	
2	Fasilitasi penyediaan	100	2021	83,47%	100%	100%	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN			

rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten						1	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	159.025.000	v	
						2	Fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	252.575.000	v	
						3	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman (DAK )	166.665.000		v

### 2.2.5 DUKUNGAN PERSONEL

- Sarjana Teknik Sipil/ Arsitek/ teknik lingkungan/ industry/ planologi atau sarjana lain untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan dalam penyelenggaraan pekerjaan Bidang Perumahan rakyat.
- Sarjana sosial / ilmu hokum/ ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Perumahan.
- Diploma 3 yang sesuai atau yang sederajat.
- SMU yang sesuai atau yang sederajat.

**Tabel 4.19**

Dukungan Personel SPM Bidang Perumahan Rakyat

<b>N</b>	<b>Status</b>	<b>Laki-</b>	<b>Perempu</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pembina Utama Muda (IV/c)			
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1		1
3	Pembina (IV/a)	3		3
4	Penata Tk. I (III/d)	5		5
5	Penata (III/c)	2	1	3
6	Penata Muda Tk. I (III/b)		2	2
7	Penata Muda (III/a)	2	1	3
8	Pengatur Tk. I (II/d)	4	2	6
9	Pengatur (II/c)	1		1
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>6</b>	<b>24</b>

## 2.2.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM:

**Tabel 4.20**  
Permasalahan dan  
Solusi SPM Bidang  
Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lokasi yang sangat jauh dari akses perekonomian dan penghasilan masyarakat yang rendah.</li><li>2. Akses Lokasi yang sulit</li></ol>	Harus dibantu dengan swadaya masyarakat setempat dan pendanaan
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lokasi yang sangat jauh dari akses perekonomian dan penghasilan masyarakat yang rendah</li><li>2. Akses Lokasi yang sulit</li></ol>	Harus dibantu dengan swadaya masyarakat setempat dan pendanaan

## 2.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

### 2.5.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

### 2.5.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH TAHUN 2021

Target dan Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.21**

Target Pencapaian Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2021	
		Indikator			Dalam Angka	Dalam (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Setiap Tahun	2	100%

2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	592.757	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	405.126	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun	250	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	300	100%

### 2.5.3 REALISASI SPM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.22**

Realisasi Pencapaian Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2021		Capaian SPM 2021	
		Indikator			Dalam Angka	Dalam (%)	Dalam Angka	Dalam (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun	586.110	100%	586.110	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun	586.110	100%	586.110	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun	493	100%	30	6,09%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun	5	100%	5	100%

5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun	150	100%	165	1%
---	--	--	-------	--------------	-----	------	-----	----

#### 2.3.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah. Yang berkaitan dengan indikator SPM bidang pekerjaan umum alokasi anggaran sebagai berikut :

Alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD tahun 2021 dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

**Tabel 4.23**

Alokasi Anggaran SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2021 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM				Sumber Dana
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Tahun)		Tahun 2021				
					Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum/Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota/Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan	221.750.000	APBD

							Peraturan Bupati/Wali Kota		
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	Program Sosialisasi, Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana kabupaten/Kota (Per jenis bencana)	110.500.000	APBD
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	100%	100%	2,82%	Program Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan.	59.940.500	APBD

4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun	100%	100%	0,87%	Program Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kot a	228.051.900	APBD
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	100%	100%	115%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	24.868.910	APBD

## 2. DUKUNGAN PERSONEL

SATPOL PP Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas sampai akhir tahun 2021 didukung oleh 164 orang, terdiri dari :

**Tabel 4.24**

Dukungan Personel SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pendidikan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Jumlah
	L	P	
SLTP/MTS	4	1	5
SLTA/MA	83	20	103
D2	1	0	1
D3	2	2	4
S1	36	11	47
S2	3	1	4
<b>JUMLAH</b>	<b>129</b>	<b>35</b>	<b>164</b>

### 5.5.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### ➤ Permasalahan

- 1) Kesadaran ketaatan masyarakat terhadap PERDA dan Perkada masih rendah
- 2) Penyelenggaraan penanganan bencana kurang intensif
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung

#### ➤ Solusi

- 1) Peningkatan sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada Masyarakat
- 2) Menyiapkan regulasi penanggulangan bencana dan SOP
- 3) Intensifitas koordinasi dalam penyelenggaraan penanganan bencana
- 4) Peningkatan kesiap siagaan dan mitigasi bencana dalam menyikapi kondisi topografi
- 5) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait, Pengusaha serta Komunitas Masyarakat

## **2.6 URUSAN SOSIAL**

### **2.6.1. JENIS PELAYANAN DASAR**

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

## 2.6.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Nilai capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Pacitan dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.25**

Target Pencapaian Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2021
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2021
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2021
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2021

5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	50%	2021
---	--	---	-----	------

### 2.6.3 REALISASI SPM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.26**

Realisasi Pencapaian Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2021			Capaian SPM 2021		Realisasi Anggaran
		Indikator	Nilai		Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2021	75%		100%	$\frac{175}{175}$	100%	268.882.216

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantardi Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2021	75%		100%	$\frac{554}{554}$	100%	87.241.350
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2021	75%		100%	$\frac{178}{178}$	100%	113.131.130
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2021	75%		100%	$\frac{5}{5}$	0	195.152.752
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	100%	2021	100%		100%	$\frac{334}{334}$	100%	28.898.000

		Bencana daerah kabupaten/kota							
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## 2.6.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.27**  
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial

NO	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN TAHUN 2019 (%)	CAPAIAN TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM TAHUN 2021			RENCANA PEMBIAYAAN	SUMBER DANA	
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	Batas waktu (Thn)		TARGET RPJMD (%)	REALISASI CAPAIAN (%) SEMESTER II	PROGRAM/KEGIATAN		APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2021	100%	75%	100%	Program Rehabilitasi Sosial		275.000.000 (APBD Tk. II) 56.700.000 (APBD Tk. I)	

2	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2021	100%	75%	100%	Program Rehabilitasi Sosial		90.949.125 (APBD Tk. II)	137.916.000
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2021				Program Rehabilitasi Sosial		116.838.905 (APBD Tk. II)	
4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2021				Program Rehabilitasi Sosial		200.000.000	
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	100%	2021				Program Penanganan Bencana		125.000.000	

### 2.6.5 DUKUNGAN PERSONEL

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

**Tabel 4.28**

Dukungan Personel SPM Bidang Sosial

PENDIDIKAN	BIDANG SOSIAL	
	L	P
SD/MI	1	-
SLTP/MTS	-	-
SLTA/MA	5	4
D1	-	-
D2	-	-
D3	-	-
S1	6	7
S2	7	-
JUMLAH	19	11
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	

### 2.5.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

➤ **Permasalahan**

1. Kurangnya anggaran untuk penanganan PSKS
2. Masih kurangnya SDM pada Dinas Sosial
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai
4. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan

-

➤ **Solusi**

1. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediannya sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PSKS
2. Meningkatkan koordinasi dan instansi terkait serta lintas sektor dalam penanganan PSKS

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021 ini disajikan dalam beberapa aspek, yaitu tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan serta tataran penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan. Selain itu dilengkapi pula dengan tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) urusan wajib yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu SPM Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintahan dalam Negeri Sosial.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pacitan terhadap Pemerintah dan Masyarakat untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, akuntabel dan transparan.